



# **RENCANA KERJA**

## **TAHUN 2023**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2022**



## GUBERNUR SULAWESI SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 1519/VII/TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomr 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomr 314)
12. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 53) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 29 Juli 2022



Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Tempat.
3. Pertinggal



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya “**Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023**” sebagai acuan dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan dan penyusunan KUA PPAS Tahun 2023.

Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2023 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan terutama pada sektor perikanan dan kelautan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Juli 2022



## DAFTAR ISI

Halaman Judul <b>SK Penetapan</b>	<i>Halaman</i>
<b>A. KATA PENGANTAR</b>	<i>i</i>
.....	<i>i</i>
<b>B. DAFTAR ISI</b> .....	<i>ii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b> .....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	54
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	65
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	109
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	118
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	118
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	119
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD</b> .....	129
4.1. Program dan Kegiatan.....	129
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	186

### LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Pembangunan kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun memberikan perkembangan yang cukup pesat dalam pemanfaatan potensi. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah mengalami perubahan cara berpikir dari berorientasi daratan menjadi berorientasi maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Besarnya potensi sumber daya kelautan pada Satuan Wilayah Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan ternyata belum sepenuhnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada pembudidaya, nelayan tradisional dan pengusaha pengolahan skala menengah dan kecil. Sumberdaya kelautan yang ada belum dapat dimaksimalkan dengan pengolahan perikanan yang baik. Belum adanya keterpaduan pengembangan perikanan karena masing-masing daerah mempunyai program tersendiri sehingga perlu memaksimalkan potensi perikanan dan kelautan dengan perspektif keruangan. Oleh karena itu pada tahun 2023 tema pembangunan mengarah pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah.

Adanya kebijakan nasional terkait penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim menjadi tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk berperan pada tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 **Tentang Percepatan Penurunan Stunting**, Intervensi yang dapat dilakukan melalui Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi sehingga perlu mendorong produksi pangan ikan di masyarakat yang terdampak stunting hal ini relevan dengan pengentasan kemiskinan. Keterbatasan daya beli masyarakat terhadap komoditas perikanan sehingga tidak dapat memenuhi gizi pada keluarga. Kemudian masih banyaknya permasalahan di wilayah pesisir, kesadaran masyarakat terkait lingkungan pesisir pantai dan laut masih kurang sehingga perlu dilakukan intervensi untuk mendukung emisi karbon di wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu pada tahun 2023 perlu menyusun suatu perencanaan yang efektif, efisien, tematik dan inklusif untuk merespon permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan saat ini.

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan ekonomis, efisien dan efektif yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART. Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 diarahkan sebagai perwujudan visi misi pemerintah daerah periode 2018-2023 dengan disusun secara terpadu dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dalam menghadapi era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

4. Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
5. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
7. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah );
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243);
18. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Sulawesi Selatan;
19. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1),
20. Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.
21. Keputusan Gubernur No. 15 Tahun 2021 tentang Pengesahan Renstra Perubahan OPD tahun 2018-2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah, (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, (2) sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, (3) mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2023 melalui perencanaan kinerja tahunan,

#### **1.3.2. Tujuan**

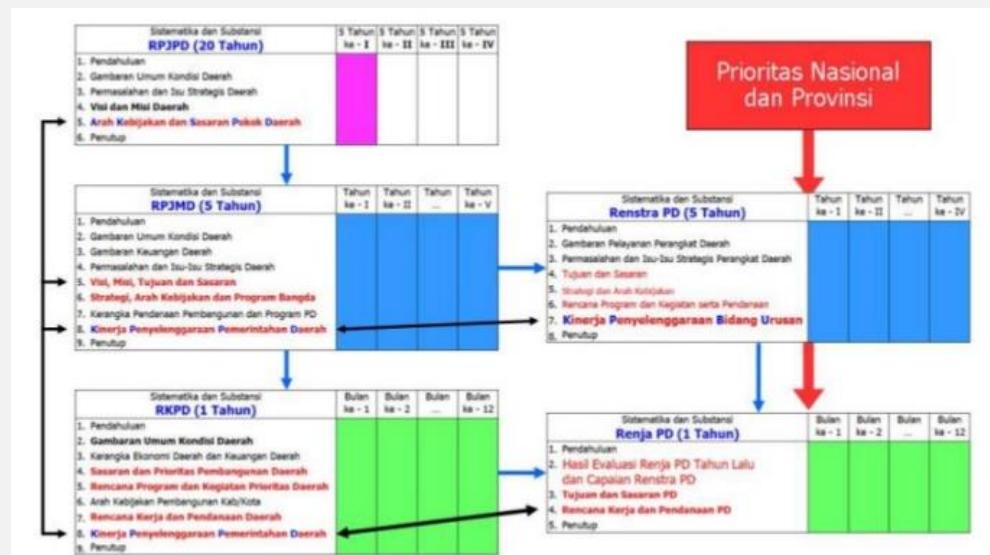
Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah (1) tersedianya dokumen perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, (2) sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan dengan memperluas cakupan sesuai pelaksanaan Reformasi Birokrasi, (3) untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA-PAS) Tahun 2023. Program dan kegiatan sebagai tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya. (4) sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2021 dan tahun berjalan tahun 2022, dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.

Keterkaitan dokumen Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah seperti ditunjukkan pada gambar 1.1.

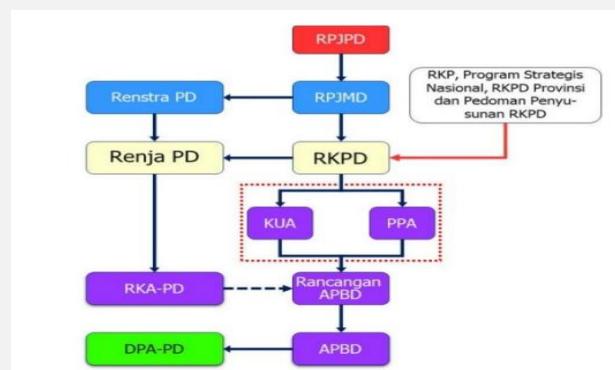
Gambar 1.1.

Keterkaitan dokumen Renja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah



Gambar 1.2

Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN,**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahu berjalan meliputi :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD,** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 (jika ada). Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD,** berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap capaian visi dan

misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian proses tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, rumusan program kegiatan yang baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.** Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,**

Menguraikan tentang Rencana Kerja dengan pendanaan yang sesuai

### **BAB V PENUTUP,**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut..

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu disajikan pada tabel 2.1 dalam bentuk format Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah**  
**dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan) Provinsi Sulawesi Selatan**  
**(Tabel T-C.29 sesuai lampiran Permendagri 86 tahun 2017 )**

Numenklatur program kegiatan berdasarkan aturan PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023	REALISASI I TARGET KINERJA HASIL PROGRA M DAN KELUARA N KEGIATA N s/d TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRA M DAN KEGIATA N (RENJA-PD TAHUN 2022)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISA SI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
2.0 0					Urusan Pilihan									
2.0 0	08				Kelautan dan Perikanan									
2.0 0	08	01. 00			Dinas Kelautan dan Perikanan									
2.0 0	08	01. 00	01		PROGRAM HILIRISASI PERIKANAN (Prioritas)	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan (Prioritas) (Rp. Trilyun)	104.16	67.7	19.79	22.46	113.4 9	20.78	110.94	107%
2.0 0	08	01. 00	01	001	Diseminasi Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan (SITTO BANGKIT)	Jumlah Inovasi Teknologi Budidaya Udang Windu Berbasis Kawasan (unit/Ha)	3500	200	1100	1110	100.9 1	1120	2430	69%
2.0 0	08	01. 00	01	002	Diseminasi Inovasi Teknologi Kebun Bibit Rumput Laut	Jumlah Inovasi Teknologi Kebun Bibit Rumput Laut (unit)	6	6	0	0	0.00	0	6	100%
2.0 0	08	01. 00	01	003	Inovasi Teknologi pengembangan budidaya Rumput Laut	Jumlah pengembangan budidaya Rumput Laut (unit)	1000	1000	0	0	0.00	0	1000	100%
2.0 0	08	01. 00	01	004	Penerapan Standar Budidaya perikanan untuk memenuhi persyaratan ekspor	Jumlah tambak perikanan budidaya yang memenuhi standar (unit)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	01	005	Pengendalian penggunaan Pakan dan Obat-obatan	Jumlah kegiatan pengendalian penggunaan pakan dan obat-obatan (unit)	30	30	0	0	0.00	0	30	100%
2.0 0	08	01. 00	01	006	Inovasi Teknologi Usaha Perikanan Budidaya dalam rangka Pengembangan Komoditas unggulan dan komoditas perikanan lainnya	Jumlah inovasi teknologi usaha perikanan budidaya Komoditas Unggulan dan komoditas perikanan lainnya (unit)	500	2	0	0	0.00	0	2	0%
2.0 0	08	01. 00	01	007	Penyediaan dan Pembesaran Induk Unggul berkualitas pada budidaya payau dan laut	Jumlah induk unggul yang berkualitas yang tersedia dan dibesarkan (ekor)	840,000	840000	0	0	0.00	0	840000	100%
2.0 0	08	01. 00	01	008	Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan analisis manajemen resiko usaha budidaya	Jumlah analisis manajemen resiko usaha budidaya payau (unit)	10	10	0	0	0.00	0	10	100%
						Jumlah monitoring kualitas lingkungan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditas unggulan (unit)	4	4	0	0	0.00	0	4	100%
						Jumlah tambak budidaya yang dapat dikendalikan melalui surveilance (unit)	11	11	0	0	0.00	0	11	100%
2.0 0	08	01. 00	01	009	Inovasi Teknologi pengembangan usaha Garam	Jumlah Inovasi Teknologi pengembangan usaha garam (unit)	180	1	0	0	0.00	0	1	1%
2.0 0	08	01. 00	01	010	Pengelolaan saluran tambak garam	Jumlah panjang saluran tambak garam yang direhab/dibangun (unit)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	01	012	Pembinaan Teknis Penanganan Hasil Tangkapan Ikan di Atas Kapal	Jumlah nelayan yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik diatas kapal (orang)	150	50	0	0	0.00	0	50	33%
2.0 0	08	01. 00	01	013	Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan (UPT Provinsi) (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan yang terbangun (unit)	25	3	0	0	0.00	0	3	12%
2.0 0	08	01. 00	01	014	Pembinaan Teknis Usaha perikanan budidaya dalam rangka pengembangan Komoditas Unggulan (Perencanaan Bisnis, Perbaikan Pencatatan Produksi dan Penataan organisasi kelompok)	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan Komoditas Unggulan (orang)	200	200	0	0	0.00	0	200	100%
2.0 0	08	01. 00	01	015	Sertifikasi Usaha Perikanan Budidaya	Jumlah unit usaha perikanan budidaya yang mendapatkan sertifikasi usaha budidaya (unit usaha)	100	120	0	0	0.00	0	120	120%
2.0 0	08	01. 00	01	016	Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pokok unit budidaya yang terbangun (unit)	8	8	0	0	0.00	0	8	100%
						Jumlah percontohan budidaya laut (unit)	160	2	0	0	0.00	0	2	1%
2.0 0	08	01. 00	01	017	Pemberdayaan Kelompok Usaha Garam	Jumlah kelompok usaha garam yang diberdayakan (kelompok)	145	0	0	0	0.00	0	0	0%
2.0 0	08	01. 00	01	018	Pengadaan sarana dan prasarana usaha garam (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana usaha garam yang dibangun (unit)	65	1	0	0	0.00	0	1	2%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	01	019	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Peningkatan Kapasitas Nelayan	Jumlah kapal yang dibangun (unit)	117	29	0	0	0.00	0	29	25%
						Jumlah sarana dan prasaranra alat tangkap (unit)	755	40	0	0	0.00	0	40	5%
						Jumlah alat bantu tangkap (unit)	2,200	5540	0	0	0.00	0	5540	252%
2.0 0	08	01. 00	01	020	Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran ikan higienis dan distribusi ikan di Pelabuhan Perikanan Wilayah 1	Jumlah sarana dan prasaranra distribusi ikan (unit)	7	7	0	0	0.00	0	7	100%
						Jumlah sarana dan prasarana pemasaran ikan higienis (unit)	100	100	0	0	0.00	0	100	100%
2.0 0	08	01. 00	01	021	Inovasi sistem olahan rumput laut	Jumlah inovasi sistem olahan produk (inovasi)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
2.0 0	08	01. 00	01	023	Penguatan pola kemitraan dan promosi produk	Jumlah promosi yang diikuti (kegiatan)	13	5	0	0	0.00	0	5	38%
						Jumlah kerjasama pada Mitra Usaha Perikanan dalam memasarkan dan menggunakan produk perikanan (Mou)	7	2	0	0	0.00	0	2	29%
2.0 0	08	01. 00	01	024	Inovasi pengolahan garam bahan baku industri, bahan baku farmasi dan garam konsumsi	Jumlah inovasi pengolahan garam bahan baku industri, farmasi, dan konsumsi (unit)	1	2	0	0	0.00	0	2	200%
2.0 0	08	01. 00	01	025	Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran ikan higienis dan distribusi ikan di Pelabuhan Perikanan Wilayah 2	Jumlah sarana dan prasaranra distribusi ikan (unit)	4	8	0	0	0.00	0	8	200%
						Jumlah sarana dan prasarana pemasaran ikan higienis (unit)	100	112	0	0	0.00	0	112	112%
2.0 0	08	01. 00	01	026	Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan konsumsi dan non konsumsi	Jumlah inovasi teknologi produk olahan hasil KP konsumsi dan non konsumsi (unit)	201	1	0	0	0.00	0	1	0%
2.0 0	08	01. 00	01	027	Pembinaan Daya Saing Hasil Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Produktif dan Kompetitif serta Sertifikasi Kelayakan Pengolah	Jumlah unit usaha pengolah yang mendapatkan pembinaan daya saing (unit Usaha)	70	70	0	0	0.00	0	70	100%
						Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolah (unit)	70	273	0	0	0.00	0	273	390%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	01	028	Layanan pengujian Laboratorium dalam rangka pemenuhan standar mutu produk dan pemasaran	Jumlah hasil uji Sampel Yang dilakukan pengujian mutu (hasil uji mutu)	70	70	0	0	0.00	0	70	100%
2.0 0	08	01. 00	01	029	Pengelolaan Kemitraan dalam rangka peningkatan Daya Saing dan Pemasaran	Jumlah pemasok dan distributor kemitraan (unit)	10	14	0	0	0.00	0	14	140%
2.0 0	08	01. 00	01	030	Koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan Daya Saing dan Kerjasama Tata Niaga Pemasaran	Jumlah peserta koordinasi (orang)	60	30	0	0	0.00	0	30	50%
2.0 0	08	01. 00	01	032	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pengawasan (unit usaha)	100	20	0	0	0.00	0	20	20%
						Jumlah usaha pembudidaya yang mendapatkan pengawasan (unit usaha)	500	120	0	0	0.00	0	120	24%
2.0 0	08	01. 00	01	033	Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah bantuan peralatan pengolahan (unit)	40	10	0	0	0.00	0	10	25%
						Jumlah perbaikan bangunan pengolahan unit pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil (unit)	40	5	0	0	0.00	0	5	13%
						Jumlah pabrik es yang direhabilitasi (unit)	20	2	0	0	0.00	0	2	10%
2.0 0	08	01. 00	01	034	Pengelolaan unit perbenihan yang sesuai standar mutu	Jumlah pengendalian kualitas lingkungan perikanan budidaya perbenihan (unit)	32	32	0	0	0.00	0	32	100%
						Jumlah sarana dan prasarana perbenihan yang dioperasionalkan (unit)	32	10	0	0	0.00	0	10	31%
						Jumlah induk unggul yang untuk menghasilkan benih (ekor)	3,000	3000	0	0	0.00	0	3000	100%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	02	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	1,904,051	787,773.50	0	0	0.00	0	0	787,773.50	41%
2.0 0	08	01. 00	02		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	28,022,974	7,375,872.70	0	0	0.00	0	0	7,375,872.70	26%
2.0 0	08	01. 00	02		Jumlah produksi garam rakyat (ton)	503,809	137,022.91	0	0	0.00	0	0	137,022.91	27%
2.0 0	08	01. 00	02	001	Penyusunan Standarisasi Fasilitas Pelabuhan Perikanan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen standarisasi fasilitas Pelabuhan Perikanan Kewenangan provinsi (dokumen)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
2.0 0	08	01. 00	02	002	Pemantauan Penerapan CPIB dan pembinaan UPR serta panti benih	Jumlah unit usaha perbenihan yang melakukan penerapan CPIB (unit usaha perbenihan)	70	70	0	0	0.00	0	70	100%
2.0 0	08	01. 00	02	003	Verifikasi data dukung Rekomendasi Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah 1	Jumlah Laporan verifikasi data dukung penerbitan rekomendasi teknis pelabuhan perikanan (laporan)	4	4	0	0	0.00	0	4	100%
2.0 0	08	01. 00	02	004	Verifikasi data dukung Rekomendasi Teknis Pelabuhan Perikanan Wilayah 2	Jumlah Laporan verifikasi data dukung untuk pelayanan rekomendasi teknis di pelabuhan perikanan (laporan)	4	4	0	0	0.00	0	4	100%
2.0 0	08	01. 00	02	005	Penyediaan dan pembesaran Induk Unggul Ikan Air Tawar beserta pakan (Instalasi Lajoa)	Jumlah calon induk yang dibesarkan (ekor)	200,000	200,000	0	0	0.00	0	200,000	100%
2.0 0	08	01. 00	02	007	Pembinaan Teknis Operasional Pelabuhan dan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Wilayah 2	Jumlah pengelola pelabuhan perikanan yang mendapatkan pembinaan teknis operasional pelabuhan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan (unit)	12	12	0	0	0.00	0	12	100%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	02	010	Koordinasi Teknis Pengelolaan Perikanan Budidaya (Penerapan dan Surveilen CBIB)	Jumlah peserta koordinasi teknis pengelola Perikanan Budidaya (orang)	60	60	0	0	0.00	0	60	100%
2.0 0	08	01. 00	02	011	Koordinasi Teknis Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah peserta koordinasi teknis pengelolaan perikanan tangkap (orang)	60	60	0	0	0.00	0	60	100%
2.0 0	08	01. 00	02	013	Pembinaan teknis tata kelola dan layanan pelabuhan perikanan wilayah 1	Jumlah pengelola pelabuhan perikanan yang mendapatkan pembinaan teknis (unit)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
2.0 0	08	01. 00	02	014	Pembinaan teknis tata kelola dan layanan pelabuhan perikanan wilayah 2	Jumlah pengelola pelabuhan perikanan yang mendapatkan pembinaan teknis (unit)	3	2	0	0	0.00	0	2	67%
2.0 0	08	01. 00	02	017	Verifikasi data dukung penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha perikanan tangkap	Jumlah laporan verifikasi data dukung penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha perikanan tangkap (Rekomendasi/Laporan)	2,700	565	0	0	0.00	0	565	21%
2.0 0	08	01. 00	02	018	Koordinasi Teknis Tata Kelola Pelabuhan Perikanan	Jumlah peserta koordinasi teknis tata kelola pelabuhan perikanan (orang)	60	60	0	0	0.00	0	60	100%
2.0 0	08	01. 00	02	019	Perlindungan dan Fasilitasi Akses Usaha Pembudidaya	Jumlah usaha pembudidaya yang terdata dan terfasilitasi perlindungan dan akses usaha modal (orang)	60	60	0	0	0.00	0	60	100%
2.0 0	08	01. 00	02	021	Identifikasi Dan Monitoring Penerapan LogBook Kapal Perikanan dan Data Keragaan Kapal Perikanan	Jumlah laporan identifikasi dan monitoring (laporan)	4	4	0	0	0.00	0	4	100%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	02	023	Perlindungan dan Fasilitasi Akses Usaha Nelayan	Jumlah usaha nelayan yang terdata dan terfasilitasi perlindungan dan akses usaha modal (orang)	60	60	0	0	0.00	0	60	100%
2.0 0	08	01. 00	02	023	Pengelolaan pelabuhan perikanan dalam rangka optimalisasi produksi	Jumlah Layanan Operasional di pelabuhan perikanan wilayah 2 (unit)	31	7	0	0	0.00	0	7	23%
						Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 1 (unit)	31	9	0	0	0.00	0	9	29%
2.0 0	08	01. 00	02	023	Koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi Garam (orang)	2,880	120	0	0	0.00	0	120	4%
						Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan (orang)	5,040	200	0	0	0.00	0	200	4%
						Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan budidaya (orang)	5,040	200	0	0	0.00	0	200	4%
						Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap (orang)	5,040	200	0	0	0.00	0	200	4%
2.0 0	08	01. 00	03	PROGRAM PENERAPAN MUTU, PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING	Volume ekspor produk KP (ton)	866,998	324789	0	0	0.00	0	324789	37%	
					Nilai ekspor produk KP (US\$ Juta)	2,285,929	694304	0	0	0.00	0	694304	30%	
					Jumlah Produksi Olahan Konsumsi dan Non Konsumsi (ton)	148,812	10524.16	0	0	0.00	0	10524.16	7%	

		1		2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	03	001	Penanganan Mutu di pelabuhan perikanan Wilayah 1	Jumlah pelaku usaha yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik (orang)	30	30	0	0	0.00	0	30	100%
2.0 0	08	01. 00	03	002	Penanganan Mutu di pelabuhan perikanan Wilayah 2	Jumlah pelaku usaha yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik (orang)	30	30	0	0	0.00	0	30	100%
2.0 0	08	01. 00	03	003	Perlindungan dan fasilitasi akses usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan	Jumlah usaha pengolah dan pemasar yang terdata dan terfasilitasi perlindungan dan akses usaha modal (orang)	629	320	0	0	0.00	0	320	51%
2.0 0	08	01. 00	03	004	Verifikasi data dukung penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha pengolahan dan pemasar	Jumlah laporan verifikasi data dukung penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha pengolahan dan pemasar (laporan)	100	40	0	0	0.00	0	40	40%
2.0 0	08	01. 00	03	005	Layanan pengujian Laboratorium dalam rangka pemenuhan standar mutu produk dan pemasaran	Jumlah sampel Produk Yang dilakukan pengujian mutu (Hasil Uji Mutu)	400	276	0	0	0.00	0	276	69%
						Jumlah layanan pemenuhan standar mutu (UPI)	400	276	0	0	0.00	0	276	69%
2.0 0	08	01. 00	03	006	Pembinaan Daya Saing Hasil Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Produktif dan Kompetitif serta Sertifikasi Kelayakan Pengolah	Jumlah unit usaha pengolah yang mendapatkan pembinaan daya saing (unit)	280	156	0	0	0.00	0	156	56%
2.0 0	08	01. 00	03	007	Penetapan standar produk perikanan untuk memenuhi persyaratan ekspor	Dukungan Fasilitasi Persyaratan sertifikasi produk hasil perikanan (unit usaha)	280	156	0	0	0.00	0	156	56%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Dukungan Fasilitasi Persyaratan sertifikasi perikanan tangkap (unit usaha)	100	35	0	0	0.00	0	35	35%
						Dukungan Fasilitasi Persyaratan sertifikasi perikanan budidaya (unit usaha)	100	25	0	0	0.00	0	25	25%
2.0 0	08	01. 00	04		PROGRAM PENGAWASAN, KONSERVASI, PENATAAN DAN REHABILITASI PESISIR DAN LAUT	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	620	620	0	0	0.00	0	620	100%
						% Penurunan tindakan IUU Fishing	37	8	0	0	0.00	0	8	22%
						Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (persen)	100	30	0	0	0.00	0	30	30%
2.0 0	08	01. 00	04	001	Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (unit)	27	11	0	0	0.00	0	11	41%
2.0 0	08	01. 00	04	002	Pembangunan/Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana Kawasan Konservasi Perairan daerah (unit)	22	5	0	0	0.00	0	5	23%
						Jumlah prasarana pulau-pulau kecil (unit)	26	8	0	0	0.00	0	8	31%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	04	003	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Kepulauan Selayar	Jumlah tambatan perahu yang dibangun (unit)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
						Jumlah masyarakat pesisir yang mendapatkan pembinaan pantai berseri (orang)	60	30	0	0	0.00	0	30	50%
2.0 0	08	01. 00	04	004	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Mamminasata	Jumlah tambatan perahu yang dibangun (unit)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
						Jumlah masyarakat pesisir yang mendapatkan pembinaan pantai berseri (orang)	60	30	0	0	0.00	0	30	50%
2.0 0	08	01. 00	04	005	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Pangkep	Jumlah tambatan perahu yang dibangun (unit)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
						Jumlah masyarakat pesisir yang mendapatkan pembinaan pantai berseri (orang)	60	30	0	0	0.00	0	30	50%
2.0 0	08	01. 00	04	006	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Ajatappareng	Jumlah tambatan perahu yang dibangun (unit)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
						Jumlah masyarakat pesisir yang mendapatkan pembinaan pantai berseri (orang)	60	30	0	0	0.00	0	30	50%
2.0 0	08	01. 00	04	007	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Bosowasi	Jumlah tambatan perahu yang dibangun (unit)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
						Jumlah masyarakat pesisir yang mendapatkan pembinaan pantai berseri (orang)	60	30	0	0	0.00	0	30	50%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	04	008	Pengelolaan Kawasan Perairan dan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Wilayah Luwu Raya	Jumlah tambatan perahu yang dibangun (unit)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
						Jumlah masyarakat pesisir yang mendapatkan pembinaan pantai berseri (orang)	60	30	0	0	0.00	0	30	50%
2.0 0	08	01. 00	04	009	Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K Prov. Sulsel	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil(dokumen)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
2.0 0	08	01. 00	04	010	Penyusunan Regulasi Pengelolaan kawasan Konservasi dan Penataan Ruang Laut,pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Jumlah Regulasi Konservasi dan Penataan ruang Laut pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (regulasi)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
2.0 0	08	01. 00	04	011	Pelestarian Biota Laut yang dilindungi	Jumlah Jenis Biota Laut yang dilindungi (jenis)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
2.0 0	08	01. 00	04	012	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Mamminasata	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove (Ha)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
						Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang(Ha)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
						Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun (Ha)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
2.0 0	08	01. 00	04	013	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Selatan	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove (Ha)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
						Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang(Ha)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
						Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun (Ha)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	04	014	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Kepulauan Selayar	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove (Ha)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
						Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang(Ha)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
						Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun (Ha)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
2.0 0	08	01. 00	04	015	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Pangkep	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove (Ha)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
						Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang(Ha)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
						Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun (Ha)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
2.0 0	08	01. 00	04	016	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Ajatappareng	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove (Ha)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
						Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang(Ha)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
						Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun (Ha)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
2.0 0	08	01. 00	04	017	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Bosowasi	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove (Ha)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
						Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang(Ha)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
						Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun (Ha)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	04	018	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan Wilayah Luwu Raya	Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem mangrove (Ha)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
						Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem terumbu karang(Ha)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
						Jumlah luasan rehabilitasi ekosistem padang lamun (Ha)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
2.0 0	08	01. 00	04	019	Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan Wilayah Mamminasata	Jumlah pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan (patroli)	6	2	0	0	0.00	0	2	33%
2.0 0	08	01. 00	04	020	Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan Wilayah Selatan	Jumlah lokasi pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan (patroli)	10	2	0	0	0.00	0	2	20%
2.0 0	08	01. 00	04	021	Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan Wilayah Kepulauan Selayar	Jumlah lokasi pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan (patroli)	6	2	0	0	0.00	0	2	33%
2.0 0	08	01. 00	04	022	Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan Wilayah Pangkajene Kepulauan	Jumlah lokasi pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan (patroli)	10	2	0	0	0.00	0	2	20%
2.0 0	08	01. 00	04	023	Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan Wilayah Ajatappareng	Jumlah lokasi pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan (patroli)	6	2	0	0	0.00	0	2	33%
2.0 0	08	01. 00	04	024	Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan Wilayah Bosowasi	Jumlah lokasi pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan (patroli)	7	2	0	0	0.00	0	2	29%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	04	025	Pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan Wilayah Luwu Raya	Jumlah lokasi pengawasan IUU Fishing dan pemantauan kapal perikanan (patroli)	7	2	0	0	0.00	0	2	29%
2.0 0	08	01. 00	04	026	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Mamminasata	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (kelompok)	10	2	0	0	0.00	0	2	20%
2.0 0	08	01. 00	04	027	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Selatan	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (kelompok)	10	2	0	0	0.00	0	2	20%
2.0 0	08	01. 00	04	029	Pemberdayaan Masyarakat sebagai Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Bosowasi	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (kelompok)	10	2	0	0	0.00	0	2	20%
2.0 0	08	01. 00	04	030	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Luwu Raya	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (kelompok)	10	2	0	0	0.00	0	2	20%
2.0 0	08	01. 00	04	031	Pengawasan Terpadu SDKP	Jumlah Peserta Koordinasi teknis Pengawasan dan pengendalian SDKP (orang)	480	60	0	0	0.00	0	60	13%
						Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (kelompok)	120	10	0	0	0.00	0	10	8%
						Jumlah Pengawasan Biota Laut yang dilindungi (kali)	12	4	0	0	0.00	0	4	33%
						Jumlah Lokasi Pengawasan Terpadu (kali pengawasan)	4	2	0	0	0.00	0	2	50%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	04	032	Penyadaran Tindakan Destruktif Fishing kepada Nelayan	Jumlah nelayan yang mengikuti penyadaran hukum (orang)	100	50	0	0	0.00	0	50	50%
2.0 0	08	01. 00	04	033	Koordinasi Teknis Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah peserta Koordinasi teknis Penataan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (orang)	60	30	0	0	0.00	0	30	50%
2.0 0	08	01. 00	04	034	Koordinasi Teknis Pengawasan dan Pengendalian SDKP	Jumlah peserta koordinasi teknis Pengawasan dan Pengendalian SDKP	60	30	0	0	0.00	0	30	50%
2.0 0	08	01. 00	04	036	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Pangkep	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (kelompok)	10	2	0	0	0.00	0	2	20%
2.0 0	08	01. 00	04	037	Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan wilayah Ajatappareng	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (kelompok)	10	2	0	0	0.00	0	2	20%
2.0 0	08	01. 00	04	037	Pengelolaan kawasan konservasi,perairan P3K dan Pemanfaatan Ekosistem Perikanan	Jumlah rehabilitasi ekosistem sumberdaya KP (Ha)	168	72	0	0	0.00	0	72	43%
						Jumlah pengelolaan dan pembinaan pantai berseri (lokasi)	28	14	0	0	0.00	0	14	50%
						Jumlah Tambatan Perahu didaerah pesisir yang dibangun (unit)	20	11	0	0	0.00	0	11	55%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	04	037	Penataan dan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi dan penataan ruang laut dan pulau-pulau kecil	Jumlah Peserta koordinasi teknis konservasi kawasan dan penataan ruang laut pesisir dan p3k (orang)	480	120	0	0	0.00	0	120	25%
						Jumlah penetapan pencadangan kawasan konservasi (kawasan)	12	4	0	0	0.00	0	4	33%
						Jumlah regulasi konservasi dan penataan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil	4	2	0	0	0.00	0	2	50%
						Jumlah dokumen rencana pengelolaan dan rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (dokumen)	4	2	0	0	0.00	0	2	50%
2.0 0	08	01. 00	04	037	Pengawasan IUU fishing dan pemantauan kapal perikanan	Pengawasan IUU fishing dan pemantauan kapal perikanan (Patroli)	28	8	0	0	0.00	0	8	29%
2.0 0	08	01. 00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	100	100	0	0	0.00	0	100	100%
2.0 0	08	01. 00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik (bulan)	60	30	0	0	0.00	0	30	50%
2.0 0	08	01. 00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan (unit)	120	60	0	0	0.00	0	60	50%
						Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan (unit)	120	60	0	0	0.00	0	60	50%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS (org)	740	296	0	0	0.00	0	296	40%
2.0 0	08	01. 00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia (unit)	150	60	0	0	0.00	0	60	40%
2.0 0	08	01. 00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (unit)	240	96	0	0	0.00	0	96	40%
2.0 0	08	01. 00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia (kegiatan)	10	4	0	0	0.00	0	4	40%
2.0 0	08	01. 00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran (kegiatan)	20	4	0	0	0.00	0	4	20%
2.0 0	08	01. 00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas (Surat perintah perdin)	665	266	0	0	0.00	0	266	40%
2.0 0	08	01. 00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100	100	0	0	0.00	0	100	100%
2.0 0	08	01. 00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara (unit)	10	2	0	0	0.00	0	2	20%
2.0 0	08	01. 00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara (unit)	35	10	0	0	0.00	0	10	29%
2.0 0	08	01. 00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara (unit)	70	35	0	0	0.00	0	35	50%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	51	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia (unit)	100	50	0	0	0.00	0	50	50%
2.0 0	08	01. 00	51	008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara (unit)	10	10	0	0	0.00	0	10	100%
2.0 0	08	01. 00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia (unit)	300	160	0	0	0.00	0	160	53%
2.0 0	08	01. 00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	50	20	0	0	0.00	0	20	40%
2.0 0	08	01. 00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100	100	0	0	0.00	0	100	100%
2.0 0	08	01. 00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah (org)	85	85	0	0	0.00	0	85	100%
2.0 0	08	01. 00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun (dokumen)	4	4	0	0	0.00	0	4	100%
						Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
						Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	1	1	0	0	0.00	0	1	100%
						Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	40	40	0	0	0.00	0	40	100%

1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.0 0	08	01. 00	52	003	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK (usulan)	50	50	0	0	0.00	0	50	100%
2.0 0	08	01. 00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan (laporan)	10	10	0	0	0.00	0	10	100%
						Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi jenis	30	30	0	0	0.00	0	30	100%
2.0 0	08	01. 00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (jenis)	30	30	0	0	0.00	0	30	100%
2.0 0	08	01. 00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (laporan)	2	2	0	0	0.00	0	2	100%
2.0 0	08	01. 00	53		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	% ASN berkinerja sangat baik	100	100	0	0	0.00	0	100	100%
2.0 0	08	01. 00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaianya (aparat)	1050	1050	0	0	0.00	0	1050	100%
						Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun (laporan)	40	40	0	0	0.00	0	40	100%
2.0 0	08	01. 00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	1050	210	0	0	0.00	0	210	20%

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Numenklatur Program Kegiatan sub Kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAHAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATA N (RENJA-OPD TAHUN 2022)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN		
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKA T REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
						1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3	25	0.00.000.38.0000				Dinas Kelautan dan Perikanan										
3	25	0.00.00.38.0000	3.25.02	5.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL	Produksi garam rakyat Ton	328,634.90	140,338.90	45,846.0	45,310.50	98.83%	46,500.0	232,149.40	70.64%	
						Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	%	100.0	23.91	9.17	18.10	197.38%	23.91	65.92	65.92%	
						Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	%	201.9	0	67.29	67.29	100.00%	67.30	134.59	66.66%	
3	5	0.00.0.00.38.0000	3.25.02	3.25.02		3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi (unit)	165.0	0.0	56	56	100.00%	56	112	67.87	
						Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi	Ha	165.0	12.0	55.0	53.30	96.91%	55	120.30	73.94	
3	5	0.00.0.00.38.0000	3.25.02	3.25.02	0	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Dokumen Penetapan Pencadangan Kawasan	5.0	0.0	1.0	1.0	100.00%	3	4	80	
						Jumlah Regulasi Konservasi dan Penataan Ruang Laut	Regulasi	9.0	0.0	0.0	0.0	0	3	3	33.33	
						Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K	Dokumen	3.0	0.0	0.0	0.0	0	1	1	33.33	
3	5	0.00.0.00.38.0000	3.25.02	3.25.02	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan PulauPulau Kecil	Jumlah Tambatan Perahu yang terbangun	36.0	3.0	12	14	116.67	12.0	26.0	72.22	
						Jumlah Rehabilitasi ekosistem pesisir	Batang	1,650,000.0	120,000	550,000.0	532,990	96.91	567,000.0	1,219,990.0	73.93	
						Jumlah Rehabilitasi ekosistem Laut	Unit	21.0	0.0	7	10	142.85	7	17	80.95	
						Jumlah Pengelolaan dan Pembinaan Pantai Berseri	Unit	15.0	0.0	5.0	6.0	120	5	11	73.33	

KODE							URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA OPD) TAHUN 2018 s/d 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA-PD TAHUN 2022)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN			
											TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
1							2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4		
3	2	0.00.00.3 8.0000	3.25.0 2	3.25. 02.1. 03			3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil	Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan Jumlah sarana dan prasarana masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Kelompok	72.0	0.0	0.0	7.0	68.13	7.0	9.72	26.07	
									Unit	3.0	0.0	0.0	1.0		1.0	33.33		
3	2	0.00.00.3 8.0000	3.25.0 2	3.25.0 2.1.0 3	01		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil	Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir	Unit	30.0	6.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.0	33.33	
3	2	0.00.00.3 8.0000	3.25.0 2	3.25.0 2.1.0 3	02		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan PulauPulau Kecil	Jumlah sarana dan prasarana usaha garam	Unit	30.0	2.0	1.0	1.0	100.0	7.0	10.0	28.59	
3	2	0.00.00.3 8.0000	3.25.0 2	3.25.0 2.1.0 3	04		Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi garam Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan usaha alternatif masyarakat pesisir berbasis inovasi	Orang	2,160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	180.0	8.33	
									Kelompok	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	100.0	
3	2	0.00.00.3 8.0000	3.2 5.03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Percentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional Nilai Produksi Perikanan Tangkap Produksi perikanan tangkap Cakupan Bina Kelompok Nelayan Percentase Produksi perikanan kelompok nelayan	% Rp. M Ton % %	78.95 44,398.86 2,002,572.90 124.15	0.0 8,631.28 398,565.30 43.81	0.0 8,675.44 396,992.30 24.46	0.0 8,678.90 389,208.20 24.46	0.0 100.04 98.04 12.89	0.0 8,852.48 98.04 52.7	57.89 26,162.66 396,992.30 25.61	57.89 26,162.66 1,184,765.80 82.31	73.32 58.93 59.16 66.30
3	2	0.00.00.3 8.0000	3.2 5.03	3.2 5.03. 1.01			3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil Jumlah nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah	Unit Orang	744.0 591.0	0.0 60.0	0.0 0.0	8.0 0.0	25.61 0.0	8.0 0.0	1.08 0.0	6.10	
3	2	0.00.00.3 8.0000	3.2 5.03	3.2 5.03. 1.01	0		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kapal yang dibangun	Unit	42.0	28.0	0.0	0.0	0.0	13.0	41.0	97.62	

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKE- GIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA PERANGKA T DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LAU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
										TARGET RENJA PERANG KAT DAERAH TAHUN 2021	REALISA SI RENJA PERANG KAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
3	2	0.00.00.3 8.0000	3 .2 5. 04		1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
3	2	0.00.00.3 8.0000	3.25 .04	3.25.04.1. 05	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai produksi perikanan budidaya Produksi perikanan budidaya Persentase ketersediaan benur berkualitas	Rp. M Ton %	28,500.0 19.657.454 300.0	14,856.34 7.375.873 0.0	14,474.73 3,898,7 100.0	12,119.87 4.081.4 80.5 80.89	73.12 140.68	12,119.87 4.093.705.8 80.89	39,096.08 15.551.059.5 0.0	137.179 79.11
3	2	0.00.00.3 8.0000	3.25 .04	3.25.04.1. 05	02	3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah produksi benur yang berkualitas Jumlah areal pengelolaan pembudidaya ikan	Unit Ekor Ha	90,000,000 .0 3,390.0 397.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17,391, 000.0 130.0 226.0	73.12 130.0 226.0	17,391,000. 0 130.0 226.0	19.32 3.83 56.93	31.53
3	2	0.00.00.38. 0000	3.25 .04	3.25.04.1. 05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah kebun laut yang tersedia Jumlah sarana prasarana budidaya laut	Unit Unit	7.0 390.0	0.0 0.0	0.0 0.0	45.72 118.0	0.0 118.0	0.0 30.26	8.18	
3	2	0.00.00.3 8.0000	3. 25 .0 4	3.25.04 .105	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah induk unggul untuk menghasilkan benih	Ekor	2,250.0	0.0	0.0	10,000. 0	69.88 10,000.0	10,000.0 444.44	29.61	
3	2	0.00.00.3 8.0000	3. 25 .0 4	3.25.04 .105	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Kualitas Lingkungan Perikanan Budidaya Perbenihan	Unit	39.0	0.0	0.0	10.0	55.50 10.0	10.0 25.64	10.62	
3	2	0.00.00.3 8.0000	3.25 .0 4	3.25.04 .105	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	3.0	0.0	0.0	88.47	0.0	0.0	13.83	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISA SI TARGET KINERJA HASIL PROGRA M DAN KELUARA N KEGIATA N S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGK AT DAERAH) TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN								
									TARGET RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGK AT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENTRA (%)							
1		2		3		4		5		6		7		8 = 5+6		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4	
3	2	0.00.0.0 0.38.0000	3.2 5.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundungan yang berlaku	0.0	0.0	87.48	71.57	75.03	71.57		0.0	1,088.89						
3	2	0.00.0.0 0.38.0000	3.2 5.05	3.25.05 .1.01	3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil	Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil  Jumlah unit usaha yang mendapatkan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yaitu pengawasan biota laut , pengawasan dokumen kapal, pengawasan aktivitas penangkapan ikan	Unit 100.0	0.0	0.0	26.0	75.03	26.0	26.0	26.0	2,214.60						
3	2	0.00.0.0 0.38.0000	3.2 5.05	3.25. 05.1.01	01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil	Jumlah jenis Biota laut yang diambil Jumlah peserta koordinasi teknis pengawasan dan pengendalian SDKP Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan Jumlah laporan pengawasan terpadu	Jenis 3.0	0.0	0.0	1.0	96.27	1.0	33.33	47.75							
3	2	0.00.0.0 0.38.0000	3.2 5.05	3.25. 05.1.01	02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan Mil	Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan  Jumlah peserta sosialisasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi wilayah boswasi Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan wilayah ajatappareng	Unit 100.0	0.0	0.0	19.0	74.75	19.0	19.0	19.0							
3	2	0.00.0.0 0.38.0000	3.2 5.05	3.25. 05.1.01	02		orang 300.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0							
3	2	0.00.0.0 0.38.0000	3.2 5.05	3.25. 05.1.01	02		unit 21.0	0.0	0.0	20.0		20.0	20.0	95.24							

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI I TARGET KINERJA HASIL PROGRA M DAN KELUARA N KEGIATA N S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
									TARG ET RENJA PERA NGKA T DAER AH TAHU N 2021	REALISA SI RENJA PERANG KAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKA T REALIS ASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3.25. 06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi Persentase Pembinaan mutu produk perikanan Nilai Hilirisasi Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi	Ton %	0.0 100.0	0.0 0.0	7,05 60.0	2,373.50 50.48	89.31 19.13	2,373.50 50.48	0.0 50.48	20.16
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3.25. 06	3.25. 06.1.02		3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang berdayasaing Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Unit unit usaha	210.0 300.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	89.31 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	20.86
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3.25. 06	3.25. 06.1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil KP Konsumsi dan Non Konsumsi Jumlah promosi yang diikuti Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai standar usaha Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk	Jenis Produk Inovasi Kegiatan promosi Orang Unit UPI	12.0 6.0 180.0 3.0 210.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	50.19 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	8.79
3	25	0.00.0.0 0.38.0000	3.25. 06	3.25. 06.1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk Jumlah Sampel Produk yang Dilakukan Pengujian Mutu Jumlah validasi sarana prasarana laboratorium pengujian Jumlah laporan penerapan prosedur mutu	UPI Hasil uji Mutu Unit Jenis	300.0 300.0 12.0 3.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 1.0 0.0	93.98 786.0 1.0 0.0	0.0 786.0 1.0 0.0	0.0 262.0 8.33 0.0	0.0 22.86	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1		2		3		4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4		
3	2	0.00.00.38.0000	X.X X.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Percentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah %	100.0	0.0	100.0	40.07	86.31	40.07	80.14	80.14	
						Percentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100.0	0.0	100.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
						Percentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	10.53	0.0	8.70	7.20	82.75	5.10	12.30	117.14	
3	2	0.00.00.38.0000	X.X X.01	X.X X.01.1.01	X.XX.01.1.01 XXX Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Dokumen	21.0	0.0	7.0	7.0	100	7.0	14	66.66
3	2	0.00.00.38.0000	X.X X.01	X.X X.01.1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	45.0	0.0	15.0	15.0	100	15.0	30	66.66
3	2	0.00.00.38.0000	X.X X.01	X.X X.01.1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Dokumen	144.0	0.0	26.0	26.0	100	26.0	52	66.66
3	2	0.00.00.38.0000	X.X X.01	X.X X.01.1.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Dokumen	90.0	0.0	30.0	30.0	100	30.0	60	66.66
3	2	0.00.00.38.0000	X.X X.01	X.X X.01.1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Dokumen	30.0	0.0	10	10	100	10	20	66.66
3	2	0.00.00.38.0000	X.X X.01	X.X X.01.1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Dokumen	90.0	0.0	30.0	30.0	100	30.0	60	66.66
3	2	0.00.00.38.0000	X.X X.01	X.X X.01.1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan terkoordinasi	Dokumen	30.0	0.0	9.0	9.0	100	9.0	18	60.00
						Jumlah data dan Informasi	Laporan	18.0	0.0	6.0	6.0		6.0	12.0	60.00
						Jumlah Data Yang Dipublikasikan	Jenis	18.0	0.0	6.0	6.0		6.0	12.0	60.00
3	2	0.00.00.38.0000	X.X X.01	X.X X.01.1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	36.0	0.0	9.0	9.0	100	9.0	18.0	50.00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN			
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENTRA (%)		
1			2		3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4			
3	25	0.00.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.02		X.XX.01.1.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Laporan	178.0	0.0	33	33.0	100	33.0	18.54	27.72
3	25	0.00.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Gaji dan Tunjangan ASN yang terkoordinasi dan tepat waktu	Laporan	36.0	0.0	9	9.0	100	9.0	25.0	27.74
3	25	0.00.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan	Laporan	36.0	0.0	0.0	9.0	100.0	9.0	25.0	49.28
3	25	0.00.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan dan telah terkoordinasi	Laporan	3.0	0.0	1	1	100	0.0	0.0	24.47
3	25	0.00.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan dan dikelola	Laporan	3.0	0.0	1	1	100	1.0	33.33	16.21
3	25	0.00.00.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun dan telah terkoordinasi	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun dan telah terkoordinasi	Laporan	54.0	0.0	130	13.0	100	13.0	24.07	24.98
3	25	0.00.00.0.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.05		X.XX.01.1.05 XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi kepegawaian %	%	275.0	0.0	50	50.0	100	50.0	100.0	36%
3	25	0.00.00.0.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan administrasi kepegawaian yang dikelola	Laporan	36.0	0.0	9.0	9.0	100	9.0	18.0	50%
3	25	0.00.00.0.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data sistem informasi kepegawaian yang telah dikordinasi	Laporan	36.0	0.0	9.0	9.0	100	9.0	18.0	50%
3	25	0.00.00.0.38.0000	X.X X.01	X.XX.01.1.05	0	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Laporan	36.0	0.0	9.0	9.0	100	9.0	18.0	50%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2018-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2021)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISA SI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
3	25	0.00.0.0 0.38.000 0	X.X X.01	X.XX. 01.1. 09		XXX.01.1.09 XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Unit	175.0	0.0	15.0	15.0	100	15.0	30.0	17%
3	25	0.00.0.0 0.38.000 0	X.X X.01	X.XX. 01.1. 09	X.XX. 09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan bebas pajak	unit	45.0	0.0	15.0	15.0	100	15.0	30.0	67%
3	25	0.00.0.0 0.38.000 0	X.X X.01	X.XX. 01.1. 09	X.XX. 09.02	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang terpelihara dan bebas pajak	unit	45.0	0.0	2.0	2.0	100	2.0	4.0	9%
3	25	0.00.0.0 0.38.000 0	X.X X.01	X.XX. 01.1. 09	X.XX. 09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			13.0	0.0	1.0	1.0	100	1.0	2.0	15%

Pada tabel 2.1 atau tabel TC-29 dilampirkan data capaian tahun 2020 sesuai dengan numklatur program kegiatan pada Permendagri no. 13 Tahun 2006 dan data capaian tahun 2021 sesuai dengan numenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Permendagri no. 90 Tahun 2020. Untuk mengetahui pencapaian realisasi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan maka pada tahun Anggaran 2021 alokasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.973.299.614.46 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 71.832.575.782.46 dan Belanja Modal sebesar Rp. 17.140.723.832 dan anggaran yang sudah berjalan pada Triwulan I Tahun 2022 terdiri dari Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp.76.988.055.667 dengan rincian belanja operasi Rp. 68.172.542.167 dan belanja modal Rp. 8.815.513.500 kemudian anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 79.288.024.805 Berdasarkan alokasi pengunaan anggaran tersebut maka sesuai rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja pada tahun lalu dan berjalan maka dapat disampaikan hal penting sebagai berikut :

## **1 Realisasi Program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .**

Kinerja program /kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra sampai tahun 2022 adalah :

Level Program :

- a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator Produksi Garam sampai tahun 2022 (capaian proyeksi) dari target Renstra sebesar 34,25%.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Nelayan yang baru mencapai 56,86%, Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan mencapai 57,08%, Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional mencapai 59,25%.
- c. Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundungan yang berlaku 57,36%.

Level Kegiatan :

- a. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan indikator kinerja

Jumlah sarana dan prasarana masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mencapai 58,33%

- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil mencapai 52,94%, Jumlah nelayan yang mendapatkan pembinaan dan bantuan pemerintah mencapai 54,90%
- c. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola mencapai 34,48%.
- d. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan indikator kinerja Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang berdayasaing mencapai 33,33% dan Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mencapai 23,33%
- e. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil mencapai 48%,

Level Sub kegiatan :

- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat dengan indikator kinerja :
  - a. Jumlah Kelompok Konservasi yang dibentuk dan dibina sebesar 19,05%;
  - b. Jumlah Regulasi Konservasi dan Penataan Ruang Laut (regulasi) dengan nilai capaian sebesar 11,11%;
- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan PulauPulau Kecil dengan indikator kinerja Jumlah tambatan perahu yang terbangun mencapai 58,33%
- Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dengan indikator kinerja Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir baru mencapai 40%
- Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana usaha garam mencapai 40%
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana usaha garam

mencapai 36,67%

- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana usaha garam mencapai 50,98%
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah alat bantu tangkap mencapai 26%, Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 53,57%, Jumlah Nelayan yang difasilitasi dalam akses pendanaan dan jaminan perlindungan mencapai 50%.
- Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan mencapai 33,33%, Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 53,57%,
- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Pengendalian Kualitas Lingkungan Perikanan Budidaya Perbenihan mencapai 58,97%,
- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan indikator kinerja Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir baru mencapai 41,67%, Jumlah promosi yang diikuti mencapai 33,33%, Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai standar usaha mencapai 33,33%, Jumlah Fasilitasi dan Bimbingan pada produk perikanan yang berdaya saing mencapai 33,33%.
- Pelaksanaan Bimbingan Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing dengan indikator kinerja Jumlah validasi sarana prasarana laboratorium pengujian mencapai 25%
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah laporan pengawasan terpadu mencapai 33,33%.
- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mencapai 48%

**2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (nilai sama)**

Kinerja program /kegiatan yang memenuhi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra sampai tahun 2022 (nilai sama) adalah :

Level Program :

- a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan mencapai 66,66%.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 67,69%.
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya mencapai 68,10%, Persentase ketersediaan benur berkualitas mencapai 66,67%.
- d. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan indikator kinerja Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan mencapai 63,36%, Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi mencapai 67,04% , Persentase pengujian mutu produk perikanan mencapai 66,67%

Level Kegiatan :

- a. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan indikator kinerja Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan mencapai 66,67%.
- b. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi mencapai 73,33% Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola mencapai 68,97%.
- c. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencapai 66,67%, Jumlah Dokumen Penetapan Pencadangan Kawasan mencapai 66,67%, Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K mencapai 66,67%.
- d. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dengan indikator Jumlah areal pengelolaan pembudidaya ikan mencapai 73,33% , Jumlah produksi benur yang

berkualitas 66,67%.

- e. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator Jumlah unit usaha yang mendapatkan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil yaitu pengawasan biota laut , pengawasan dokumen kapal, pengawasan aktivitas penangkapan ikan mencapai 67,23%

Level Sub kegiatan :

- Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat dengan indikator kinerja : Jumlah Dokumen Penetapan Pencadangan Kawasan dengan nilai capaian 66,67%, Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K mencapai 66,67%.
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan indikator kinerja Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi garam mencapai 75%, Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan usaha alternatif masyarakat pesisir berbasis inovasi mencapai 66,67%
- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana usaha garam mencapai 50,98%
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah alat bantu tangkap mencapai 26%, Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 53,57%, Jumlah Nelayan yang difasilitasi dalam akses pendanaan dan jaminan perlindungan mencapai 50%.
- Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 1 mencapai 71,43%, Jumlah Layanan Operasional pelabuhan perikanan wilayah 2 mencapai 66,67%
- Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan mencapai 66,67%.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah Penyediaan Sarana prasarana Pelabuhan Yang Terbangun di Wilayah 1 mencapai 66,67%.

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah diseminasi inovasi teknologi budidaya udang windu berbasis kawasan (DE SITTO BANGKIT) mencapai 66,67%, Jumlah pengembangan budidaya udang windu 1.000 Ha (WINDU BANGKIT) mencapai 66,67%.
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi mencapai 66,67%.
- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan indikator kinerja Jumlah Sarana Inovasi Teknologi Usaha Masyarakat Pesisir baru mencapai 41,67%, Jumlah promosi yang diikuti mencapai 33,33%, Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai standar usaha mencapai 33,33%, Jumlah Fasilitasi dan Bimbingan pada produk perikanan yang berdaya saing mencapai 33,33%.
- Pelaksanaan Bimbingan Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing dengan indikator kinerja Jumlah Unit Usaha Pengolah Yang Mendapatkan Pengembangan mutu produk (UPI) mencapai 66,67%, Jumlah Sampel Produk yang Dilakukan Pengujian Mutu (Hasil Uji Mutu) mencapai 67,55%, Jumlah laporan penerapan prosedur mutu mencapai 66,67%.
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah jenis Biota laut yang dilindungi mencapai 66,67%.
- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan mencapai 67,33%

**3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .**

Kinerja program /kegiatan yang melebihi target kinerja tingkat capaian realisasi Renstra tahun 2022 adalah

Level Program :

- a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan mencapai 72,76%.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap mencapai 75,75%.
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya mencapai 70,61%.

Level kegiatan :

- a. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi mencapai 73,33% .
- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dengan indikator Jumlah areal pengelolaan pembudidaya ikan mencapai 73,33%

Level Sub kegiatan :

- Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja Jumlah Rehabilitasi ekosistem Laut mencapai 152,38%
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan indikator kinerja Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi garam mencapai 75%
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut dengan indikator kinerja Jumlah sarana prasarana budidaya laut dengan nilai capaian 205,38%.
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Jumlah sarana alat tangkap mencapai 147,67%
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah Penyediaan Sarana prasarana Pelabuhan Yang Terbangun di Wilayah 2 mencapai 83,33%.
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut dengan indikator kinerja Jumlah induk unggul untuk menghasilkan benih dengan nilai capaian 427,87%,

- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan indikator kinerja Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan teknis peningkatan produksi olahan dengan nilai capaian 138,89%.
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil dengan indikator kinerja Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok) mencapai 83,33%
- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil Mil dengan indikator kinerja Jumlah peserta sosialisasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi mencapai 331,67%

#### **4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan**

Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

1. Sebagian besar program mendukung untuk peningkatan produksi namun keberhasilan produksi perikanan dipengaruhi oleh faktor alam seperti perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir (garam). Tahun 2021 Sulawesi Selatan mengalami cuaca ekstrim dengan curah hujan yang cukup tinggi dan gelombang pasang;
2. Kurangnya pemberdayaan tenaga pendamping karena tidak ada biaya insentif;
3. Aktivitas masyarakat masih terbatas karena biaya operasional cukup tinggi dan sulitnya akses modal usaha (dampak dari pandemik Covid-19).
4. Perencanaan yang tidak sistematik dan kurang konsistensi terhadap dokumen perencanaan.
5. Keterbatasan anggaran , kendala teknis dalam pelaksanaan pekerjaan dan adanya kajian ulang alokasi anggaran terhadap pekerjaan kegiatan tertentu.

Faktor – faktor penyebab terpenuhinya melebihi target kinerja program/kegiatan :

1. Adanya sinkronisasi program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan program kegiatan didukung dengan dokumen penunjang dan terarah.

3. Konsistensi pada jadwal pelaksanaan dan meminilisir terjadinya resiko tidak terpenuhinya target kinerja.

## **6. Implikasi atas realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target terhadap target capaian program dan kegiatan**

Implikasi atas realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target capaian program dan kegiatan yaitu tidak tercapainya target kinerja pada akhir tahun Renstra jika pelaksanaan kinerja Renja tidak memenuhi target sehingga berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta kinerja tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

Adapun kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :

- a. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, penganggaran baik itu staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.
- b. Perlu kegiatan mengkaji penerapan teknologi tunnel/rumah prisma dengan konstruksi “diperbaharui” sebagai percontohan/kawasan di lokasi penghasil garam. Dengan penerapan teknologi tunnel garam dapat membantu petani untuk tetap berproduksi meski sedang hujan pada Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- c. Perlu kegiatan Koordinasi dengan pihak kabupaten/kota dan penyuluhan untuk usulan kelompok nelayan yang sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan
- d. Perlu kegiatan penguatan kelompok dengan penerapan inovasi teknologi penangkapan ikan yang modern dan ramah lingkungan sehingga dapat meningkatkan produksi dan kualitas hasil tangkapan

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi. Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2.2. (T-C.30) sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**(Tabel T-C 30, sesuai Permendagri 86 Tahun 2017)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021**

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasi onal	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2) 2021	Tahun (n-1) 2022	Tahun (n) 2023	Tahun (n+1) 2024	Tahun (n-2) 2021	Tahun (n-1) 2022	Tahun (n) 2023	Tahun (n+1) 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Produksi Garam Rakyat (ton)		48.450	46.500	47.500	48.450	-	.1.155.2	47.500*	48.450	-	
2	Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan (%)		100	50.17	74.08	100	-	28.28	74.08	100	-	
3	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)		67.31	67,29	67,30	67.31	-	67,29	67,30	67.31	-	
4	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)		9.210,12	8.852,48	9.029,52	9.210,12	-	10.742,8	9.029,52 M	9.210,12 M	-	
5	Produksi Perikanan Tangkap (ton)		413.030,8	396.992,3	404.932,2	413.030,8	-	429.431,2	404.932,2	413.030,8	-	
6	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)		30,25	23,89	27,07	30,25	-	18,47	27,07	30,25	-	
7	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%)		78,95	57,89	68,42	78,95	-	63,16	68,42	78,95	-	
8	Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (%)		27,17	25,61	26,79	27,17	-	18,11	26,79	27,17	-	
9	Nilai produksi perikanan budidaya (Rp.M)		15.958,39	14.474,73	15.198,47	15.958,39	-	17.944,4	15.198,47 M	15.958,39 M	-	
10	Produksi perikanan budidaya (ton)		4.298,391,1	3.898,767,4	4.093.705,8	4.298,391,1	-	4.298,391,1	4.093.705,8	4.298,391,1	-	
11	Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)		100	100	100	100	-	100	100	100	-	
12	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)		89,85	87,48	88,73	89,85	-	69.18	88,73	89,85	-	
13	Nilai Hilirisasi Produksi olahan Ikan konsumsi dan non konsumsi (Rp.M)		317,28	304,96	311,06	317,28	-	280,30	311,06 M	317,28 M	-	
14	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi (Ton)		5.544,1	5.329,0	5.436,2	5.544,1	-	5.497,4	5.436,2	5.544,1	-	
15	Persentase Pembinaan mutu produk perikanan (%)		100	60	80	100	-	60	80	100	-	

Sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum bahwa Perangkat Daerah yang termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang melaksanakan pelayanan dasar sesuai pasal 3 sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah yang masuk dalam Urusan Pilihan

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang termuat dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Sehingga ditetapkan kinerja pelayanan dan penetapan Kinerja dalam suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi garam yaitu melalui pelayanan peningkatan kualitas dan mutu produk garam berupa :
  - a. Memberikan pelayanan rekomendasi izin usaha garam
- Memberikan pelayanan dalam rangka Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan yaitu pelayanan kebutuhan petambak garam dalam peningkatan produksi dengan mengidentifikasi usulan petambak garam.
- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap melalui fasilitasi usaha dan pembinaan kelompok yaitu berupa :
  - a. Memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Usaha dan dokumen kapal
  - b. Memberikan pelayanan Rekomendasi dalam rangka penerbitan izin usaha Perikanan tangkap dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 1.004 unit usaha.
- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya melalui fasilitasi usaha dan pembinaan kelompok yaitu berupa :
  - a. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Pembudidayaan Ikan yang Baik (CBIB) dengan hasil capaian pelayanan sebanyak , pada triwulan II sudah melakukan pelayanan sebanyak 119 surat rekomendasi
  - b. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 27 surat rekomendasi
- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya melalui fasilitasi usaha dan pembinaan kelompok yaitu berupa
  - a. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor Produk Perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 1 unit pengolahan ikan.
  - b. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor induk udang vanname dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 4 unit dengan jumlah impor induk udang sebanyak 16.000 pasang induk dan ikan koi/mas/koki 15.000 ekor.
  - c. Produksi Benih Ikan Air Tawar

Tahun 2021 sebanyak 5.304.000 Ekor berukuran 1-3 cm dengan perincian ikan mas : 3.902.500 ekor dan ikan nila : 1.401.500 ekor.

d. Produksi Benur Air Payau

Tahun 2021 sebanyak 15.098.000 ekor jenis windu dengan uraian sebanyak 11.348.000 ekor menjadi sumber PAD dengan penjualan sebesar Rp. 306.396.000,- dan untuk bantuan ke masyarakat sebesar 3.750.000 ekor.

e. Memberikan pelayanan rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap dan surat keterangan andon.

- Memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan dan peningkatan Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi
  - a. Melakukan pengujian mutu hasil perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 5.951 unit (tahun 2021)
  - b. Memberikan rekomendasi ijin usaha perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 2.151 unit
- Memberikan pelayanan rekomendasi pemanfaatan kawasan konservasi dan perairan dan pembinaan peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan ekosistem laut.

Adanya perubahan kebijakan menyebabkan beberapa program pemerintah mengalami transisi perencanaan sehingga dalam rangka efisiensi anggaran dilakukan refocusing/rasionalisasi belanja pada kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak melaju sesuai dengan agenda karena adanya reformasi pada program pemerintah dimana perangkat daerah harus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah dan perubahan metode penganggaran sehingga turut mempengaruhi pencapaian kinerja program kegiatan yang masih di bawah target.

Selain itu dalam pelaksanaannya masih terdapat kegiatan yang tidak tepat dan belum terukur secara jelas kinerjanya sehingga diperlukan perbaikan/perubahan rencana kerja dan perubahan rencana strategis.

Pada bagian ini juga disajikan capaian kinerja IKU pada pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 s/d 2022 (tahun berjalan) sebagaimana tabel berikut ini (terlampir). Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dan Implikasi capaian IKU terhadap Renstra 2018 -2023 maka Evaluasi Capaian Renstra yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dengan sasaran sebagai berikut :

**a. Sasaran :**

**Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan**

Pada sasaran ini terdapat 3 indikator kinerja yaitu persentase nilai Sakip Perangkat Daerah, persentase capaian kinerja program perangkat daerah dan persentase nilai temuan material LHP yang ditindaklanjuti.

**Tabel 2.3**  
**Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2021	2022	2021	2022*	2021	2022*	
1.1	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perangkat daerah	Persentase Nilai Sakip Perangkat Daerah	86.02	86.21	83.78*	86.21*	97,39	99.75*	Data tahun 2021 dan 2022 adalah data proyeksi
		Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	98	98.5	110.47	111*	112.72	112.79*	
		Persentase Nilai temuan Material LHP yang ditindaklanjuti	82	100	100	100*	100	100*	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran							106.36	106.26	Predikat sangat baik

Untuk mencapai sasaran diatas maka terdapat 2 strategi yaitu 1) penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pengelolaan 2) ketersediaan dukungan operasional kegiatan . Program kegiatan yang dominan terhadap pencapaian sasaran tersebut yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama yang terkait dengan peningkatan kontribusi sektor perikanan adalah seperti pada tabel 2.3. Berdasarkan data diatas persentase capaian terhadap Rencana Kerja tahun 2021 yaitu persentase Nilai Sakip OPD diharapkan dapat mencapai target, kemudian persentase capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan) telah mencapai 108,25 % dan telah mencapai target perencanaan hal ini dipengaruhi oleh beberapa program kegiatan telah melampaui target indikator kinerja. Kemudian % ASN rata-rata memiliki nilai SKP Kategori Baik dimana Integritas dan Komitmen ASN untuk bekerja dan melakukan pelayanan sudah ada peningkatan.

**b. Sasaran :**

**Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas perikanan**

Sasaran ini didukung oleh Program **Pengelolaan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Perikan Budidaya** yang merupakan program prioritas yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikator kinerjanya fokus ketersediaan bahan baku pada hilirisasi produk. Program ini dikembangkan agar terjadi peningkatan produktivitas produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi baik pada pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengembangan usaha garam dan pengembangan usaha pengolahan sampai tahun 2023.

**Tabel 2.4**  
**Sasaran meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas perikanan**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	
2.1	Sasaran : Meningkatnya jumlah produksi produktivitas perikanan	Produksi Perikanan (ton)	4.342.259,8	4.546.138	4.500.184,6	-	103,6	-	
		Kontribusi PDRB Perikanan (%)	4,6	5,1	9,4	-	204,4	-	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						154		Predikat sangat baik

Adapun tujuan sasaran adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya. Selain itu komoditas udang, bandeng dan rumput laut tetap menjadi komoditas unggulan sehingga perlu digalakkan dalam rangka peningkatan produksi budidaya. Peluang pengembangan budidaya dan perikanan tangkap berupa inovasi teknologi yang dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan memfasilitasi pelayanan kepada pembudidaya dan nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan hygienisasi sarana prasarana perikanan. Pengembangan usaha garam juga menjadi prioritas pada program hilirisasi perikanan dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 5 kabupaten yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar, kabupaten Pangkep, Maros dan kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas prasarana seperti gudang garam kapasitas <100 ton, penerapan geomembran.

**c. Sasaran :**

**Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan**

Tahun 2021 konsumsi ikan meningkat mencapai 57,46 kg/kap dari tahun 2022 yang telah mencapai 56,3 kg/kap dan di tahun 2021 konsumsi ikan di Sulawesi Selatan diharapkan dapat meningkat lagi. Sedangkan pencapaian konsumsi ikan nasional pada tahun 2020 telah mencapai 56,39 kg/kap (Data KKP) menargetkan pencapaian konsumsi ikan untuk tahun 2021 sebesar 59,50 kg/kap dan terealisasi sebesar 68,30 kg/kap . Hal ini menggambarkan bahwa produk perikanan untuk dikonsumsi tersedia dan cukup baik yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya. Selain itu, peningkatan capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan tersebut juga menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan memberikan hasil yang signifikan.

**Tabel 2.5**  
**Sasaran meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	
2.2	Sasaran : Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Jumlah konsumsi ikan	59.50	62.7	68.30	-	114.78	-	Data tahun 2022 belum ada
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						114.78		Predikat sangat baik

**d. Sasaran :**

**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha kelautan dan perikanan**

Pada tahun 2021 telah diupayakan perbaikan sarana dan prasarana di daerah-daerah pesisir dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat pesisir, sehingga kemajuan akses masyarakat yang berada di pulau-pulau dan wilayah pesisir terhadap pembangunan dapat berkembang lebih baik. Perbaikan-perbaikan tersebut meliputi sarana tambatan perahu. Pada tahun 2021 ditargetkan cakupan Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah mencapai 40% sampai akhir anggaran tahun 2021. Begitu strategis dan tingginya potensi bahari yang dimiliki Sulawesi Selatan, menjadi hal

penting bagaimana daerah ini dapat memberdayakan desa pesisir yang tersebar di beberapa kabupaten/kota sehingga berdampak pada pencapaian Nilai Tukar Nelayan. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN pada tahun 2021 telah mencapai 107,43 diharapkan tahun 2023 dapat mencapai peningkatan.

**Tabel 2.6**  
**Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha kelautan dan perikanan**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	
2.3	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha kelautan dan perikanan	NilaiTukar Nelayan (NTN)	102.37	103.19	107.43	109.64*	102.07	105.05*	Data Tahun 2022 adalah data sampai bulan Mei
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						102.7	105.05	Predikat sangat baik

e. **Sasaran :**

**Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan**

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan, telah dilaksanakan identifikasi potensi sumber daya wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, identifikasi kawasan konservasi laut, pembudidayaan *mangrove fisheries*, penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum dalam tindak pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Indikator ini didukung dengan Program Pengawasan, konservasi, penataan dan rehabilitasi pesisir dan laut dimana dilakukan pengawasan untuk penerapan IUU Fishing sehingga diharapkan proporsi tangkapan ikan dapat mencapai batas yang diijinkan agar sumberdaya ikan tidak berkurang. Demikian juga pada kawasan lindung dan perairan juga dilakukan penataan dan rehabilitasi sehingga rasio kawasan lindung dapat terjaga .

**Tabel 2.7**  
**Sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -		REALISASI KINERJA		CAPAIAN (%)		KETERANGAN
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	
3.1	Sasaran : Meningkatnya kelestaria ndan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luasperairan territorial (%)	1.05	1.07	1.57	1.58*	149.52	147.66*	Data Tahun 2022 adalah data proyeksi
		Proporsi tangkapkan ikan yang berada dalambatasan biologis yang aman (%)	35.72	38.58	56.12	-	161.64	-	Data tahun 2022 blm ada
		Persentase penurunan Tindakan IUU Fishing (%)	20.83	26.32	83.33	-	50.01	-	Data tahun 2022 blm ada
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						120.39		Predikat sangat baik

Realisasi presentase rata-rata capaian Indikator Kinerja /IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 adalah 120,39 (**predikat sangat baik**). Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

#### 1. Sejauhmana tangkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan Lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan melalui Forum Perangkat Daerah dan Sinkronisasi Program Kegiatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah maka dengan adanya isu-isu penting maka dapat melengkapi penelaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya seperti pada proses penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan juga penelaahan terhadap isu daerah dan nasional yang mempengaruhi. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi eksternal yang ada sebagai dinamika nasional dan regional.

Beberapa isu dan dokumen perencanaan lainnya yang ditelaah, meliputi:

## **1. Pandemi COVID - 19**

Secara umum, kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan relatif membaik, tercermin dari Nilai Tukar Nelayan yang tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan pemulihan ekonomi dan vaksinasi yang semakin meluas turut meningkatkan keyakinan dan kepercayaan terhadap peningkatan kesejahteraan. Di tengah tekanan ekonomi akibat COVID-19 tingkat penduduk miskin di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Upaya pemerintah dan swasta dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui berbagai stimulus kebijakan, ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan yang merupakan sasaran utama dalam pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan untuk keseluruhan tahun 2021 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Pulihnya perekonomian diprakirakan disumbang oleh perbaikan konsumsi dan investasi yang didukung oleh peningkatan mobilitas masyarakat pasca implementasi kebijakan pembatasan aktivitas. Secara sektoral, pertumbuhan terutama disumbang oleh kinerja Lapangan Usaha Perdagangan, Industri Pengolahan, dan Transportasi yang pulih setelah terkontraksi dalam pada tahun 2020. Di sisi lain, meningkatnya produksi perikanan seiring dengan upaya peningkatan indeks penebaran dan peningkatan produksi budidaya juga mendukung kinerja perikanan. Adapun penerapan PPKM level 4 diprakirakan menahan pemulihan ekonomi.

## **2. Perubahan Iklim**

Isu terkait lingkungan hidup menjadi salah satu hal yang sangat mengemuka

belakangan ini. Dalam proses pembangunan, seringkali kepentingan ekonomi dan lingkungan dihadapkan dengan kepentingan lingkungan. Permasalahan lingkungan pada dasarnya adalah irisan dari permasalahan yang terjadi pada lingkungan alami (natural environment), lingkungan buatan (man-made environment) terkait aktivitas perekonomian, dan lingkungan sosial (social environment). Oleh sebab itu, penanganan permasalahan lingkungan harus dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kondisi ekonomi dan lingkungan yang dilakukan di Sulawesi Selatan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan di Sulawesi Selatan ditandai dengan terlampaunya daya dukung dan daya lingkungan. Saat ini yang menjadi perhatian degradasi penurunan kualitas air dan penurunan kualitas udara yang diakibatkan oleh meningkatnya emisi kendaraan bermotor, emisi cerobong, dan emisi pembakaran sampah oleh masyarakat. Meningkatnya frekuensi dan risiko bencana di Sulawesi Selatan sangat berkaitan dengan meningkatnya kerusakan lahan yang diakibatkan oleh berkurangnya tutupan vegetasi dan meningkatnya luas lahan kritis. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam berlebihan, meningkatnya kerusakan habitat tanaman dan satwa langka, dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, menyebabkan tingginya kerusakan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Berkaitan dengan isu perubahan iklim yang telah berkembang menjadi isu global dan nasional, tingginya emisi gas rumah kaca diyakini secara ilmiah menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Indonesia berkomitmen untuk turut berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca dengan menetapkan target sebesar 29% melalui pendanaan dan 41% dengan tambahan pendanaan dari dukungan internasional pada Tahun 2030. Hal ini ditegaskan dengan diratifikasinya Paris Agreement melalui penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Sebelumnya, Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Sulawesi Selatan.

### **3. Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)**

Agenda pembangunan dunia Millennium Development Goals (MDGs) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015 telah digantikan dengan Sustainable

Development Goals (SDGs). Program SDGs aktif mulai Tahun 2016 hingga Tahun 2030. Pasca agenda pembangunan 2015, yang dikenal dengan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2016-2030, diharapkan dapat menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, membangun kota-kota secara berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan hutan. Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan bersama masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun dari 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan didukung oleh sektor Kelautan dan Perikanan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh K/L dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

#### **4. Transformasi Digital**

Digitalisasi terus berkembang pesat di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, baik pada tingkat global, nasional, maupun lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, di seluruh provinsi di Indonesia, secara rata-rata 44,5% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Sementara itu, di Sulawesi Selatan sendiri, secara rata-rata 43,91% penduduk merupakan pengguna internet. Lebih jauh, sektor telekomunikasi di Sulsel tumbuh 6,4% pada tahun 2021. Digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat diharapkan bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui optimalisasi teknologi tepat guna sehingga bisa meningkatkan produktivitas lapangan usaha, penyediaan akses informasi secara cepat dan efektif sehingga bisa menurunkan biaya transaksi, maupun pembukaan akses informasi dan pemasaran sehingga para pelaku usaha, termasuk UMKM, bisa

terintegrasi dengan pasar global. Namun demikian, adopsi digital oleh lapangan usaha belum secepat yang diharapkan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah adanya Isu strategis dan permasalahan pada sektor kelautan dan Perikanan yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 1) pengelolaan perikanan (fisheries management); 2) penegakan hukum (law enforcement); dan 3) pelaku usaha perikanan 4) Hilirisasi hasil perikanan. Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan merupakan isu strategis dan permasalahan yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan Hal ini telah diindikasikan dengan tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Sulawesi Selatan

Sebagai contoh untuk perikanan tangkap, banyak perairan laut di kawasan barat dan tengah Indonesia sudah menunjukkan gejala padat tangkap (overfishing), seperti Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone. Akibatnya, pada daerah-daerah penangkapan ikan tertentu yang mengalami over-exploitation, nelayan-nelayannya umumnya menjadi miskin, karena sulit mendapatkan ikan hasil tangkapan. Selain itu pula, sangat rawan terjadinya konflik antar nelayan di perairan tersebut. Disisi lain, pada daerah-daerah penangkapan ikan yang tingkat pemanfaatannya belum optimal atau underfishing, sumber daya ikan yang bernilai tersebut terkesan dibuang begitu saja, bahkan di beberapa perairan, yang memanfaatkannya adalah kapal-kapal perikanan illegal dari negara lain.

Untuk contoh perikanan budidaya, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan nasional akan benih dan pakan seringkali tidak mencukupi, sehingga aktivitas perikanan budidaya, sebagian masih tergantung dengan negara lain yang tentunya akan mengancam keberlanjutan usaha para pembudidaya ikan nasional. Kenyataan seperti tersebut di atas sebagai cerminan bahwa betapa belum kuatnya pengelolaan perikanan nasional, sehingga pemerintah perlu segera menata dan memperbaiki kelemahan yang ada sekarang dengan melakukan penguatan kebijakannya.

Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Indonesia juga relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas. Belum kuatnya penegakan hukum di bidang perikanan ini, selain mengakibatkan kerugian negara, baik secara ekonomi dan lingkungan, juga berdampak pada penegakan kedaulatan wilayah negara, sehingga dapat mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi tidak berdaulat di negaranya sendiri. Contoh utama akibat belum tegaknya hukum di bidang perikanan tangkap adalah maraknya kegiatan IUU fishing yang jelas-jelas menjadi kendala utama untuk

mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan. Sementara dibidang perikanan budidaya adalah masalah peraturan tata ruang yang sering kali dilanggar atau tidak dipatuhi tanpa ada tindakan yang tegas dari pemerintah atau aparat penegak hukum. Bahkan tidak sedikit aturan tata ruang diganti atau disesuaikan dengan kepentingan pribadi atau kelompok penguasa Isu strategis lainnya adalah pelaku usaha perikanan yang sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dan juga belum memiliki skala usaha yang layak (economy of scale). Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, yang melakukan praktik-praktik usaha perikanan yang tidak berkelanjutan, bahkan beberapa masih ada yang menggunakan alat tangkap atau bahan-bahan yang berbahaya bagi sumber daya ikan, lingkungan, dan manusianya. Terlebih lagi ditambah dengan skala usaha ekonomi mereka yang belum layak, sehingga para pelaku usaha perikanan tersebut lebih cenderung untuk mengejar kuantitas produksi semata, tanpa memperhatikan daya dukung ekosistemnya.

Produk perikanan yang dihasilkan pelaku usah perikanan dirasa masih sulit menembus pasar karena kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil produksi masih belum stabil. Volume produksi masih dapat dioptimalkan dengan meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas di bidang manajemen, akses terhadap informasi pasar, akses permodalan, teknologi dan sumberdaya manusia (SDM).

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan dan perikanan antara lain:

1. Adanya perubahan iklim sehingga aktivitas pembudidaya dan nelayan terhambat pada kebutuhan sarana operasional ;
2. Pelayanan tidak dapat maksimal karena dampak pandemik;
3. Pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang diharapkan karena adaptasi terhadap aturan dan kebijakan baru ;
4. Terdapat beberapa target indikator yang berpotensi tidak tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan kelautan dan perikanan kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, diantaranya adalah :

1. Bergesernya proses pengadaan barang dan jasa, tender/lelang sehingga pelaksanaan kegiatan tidak selesai tepat waktu;

2. Kebutuhan Bahan Bakar untuk operasional kegiatan baik darat maupun di laut terbatas karena anggaran tidak tersedia akibat refocusing anggaran;
3. Pendampingan dan pembinaan pada masyarakat terbatas karena tidak tersedianya anggaran;
4. Unit kerja masih belum memahami pencapaian indikator kinerja sehingga masih terdapat target indikator yang belum tercapai;
5. Unit kerja belum memahami target indikator yang berdampak hasil (outcomes) sehingga penerapan kebijakan pemerintah yaitu Quick Wins (perubahan yang terjadi pada masyarakat) belum sepenuhnya tercapai.

Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah: - Kurangnya kegiatan yang sifatnya padat karya, penguatan iklim investasi dalam menghadapi pasar baik local maupun global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif.

**3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable DevelopmentGoals*)**

Selain itu Adapun dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable DevelopmentGoals*) maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2004 mempedomani NSPK dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan belum termasuk Perangkat Daerah yang memiliki SPM namun dalam penyelenggaraan pelayanan tetap melaksanakan kinerja pelayanan dan mendukung tujuan pembangunan SDGs. Adapun pencapaian program internasional yang didukung oleh sektor kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Evaluasi Pencapaian SDGs Sektor Kelautan**

Kode Indikator	Tujuan / Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Target TPB/SDGs							Capaian TPB/SDGs							OPD Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022 (Proyeksi)	2023 (Proyeksi)			
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	87%	87%	-	82,4	86,88	87,48	88,73	89,85	54,8	50,13	66,4	69,18	88,70	99,87	Dinas kelautan dan perikanan		
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil		2 regulasi	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	Dinas kelautan dan perikanan		
14.b.1.(a)	Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan		19 kab/kota	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	Dinas kelautan dan perikanan		
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi (Orang)	500.000	197.253					39.451	78.902	23.814	37.811	11.587	11.827	12.027	12.250	Dinas Kelautan dan Perikanan		

Pencapaian target indikator SDGs yaitu :

1. Persentase kepatuhan pelaku usaha pada tahun 2021 sebesar 69.18 % masih belum mencapai target sebesar 87.48 namun diupayakan pada tahun 2023 telah mencapai target akhir Renstra.
2. Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil pada tahun 2020 ditetapkan Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Sumberdaya Ikan tanggal 9 Juni 2020;
3. Jumlah Kab/ Kota dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 19 kabupaten/kota memiliki hak akses dalam permodalan dan pendanaan untuk pengembangan usaha seperti KUR dan Jaminan dalam berusaha melalui pelayanan kartu KUSUKA;
4. Jumlah nelayan yang terlindungi (Orang) yaitu nelayan mendapatkan jaminan asuransi dalam melakukan usahanya dimana pada tahun 2021 sebanyak 11.827 orang dan pada diupayakan tahun 2023 dapat

mencapai target

#### **4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah**

Adapun Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :

a. Peluang

Secara keseluruhan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah situasi pertumbuhan ekonomi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang kondusif, koordinasi yang cukup baik antara pusat dengan kabupaten/kota dan mitra usaha, sehingga secara harmonisasi dapat mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Tantangan

- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Kurangnya literasi baik pemerintah maupun masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.

#### **5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan**

Adanya peluang dan tantangan tersebut maka dapat diformulasikan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Sehingga jika dikaitkan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan maka dapat dipetakan sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Pemetaan Isu Strategis dan Rekomendasi Kebijakan**

Isu Strategis Nasional	Permasalahan	STRATEGI	KEBIJAKAN
Pandemi Covid 19 SDGs	1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia 2. Masih Tingginya Angka Kemiskinan 3. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan ekonomi local	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan hasil produksi perikanan</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana</li> <li>• Pengembangan sektor unggulan sesuai dengan permintaan pasar</li> </ul>
Perubahan Iklim	1. Masih tingginya ketimpangan Pendapatan Masyarakat 2. Belum Optimalnya Pengelolaan SDA	Pengembangan sektor Kelautan dan perikanan yang mandiri, inovatif, berdayasaing dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang inovatif akan teknologi</li> <li>• Pengembangan potensi perikanan dan kelautan berbasis wilayah dan berkelanjutan</li> <li>• Peningkatan usaha alternatif minat masyarakat pesisir</li> <li>• Penerapan pola Kemitraan usaha perikanan</li> <li>• Peningkatan manajemen dan kinerja pelaku Usaha perikanan (Aparatur Sipil Daerah dan Masyarakat pelaku usaha perikanan)</li> </ul>
SDGs Transformasi Digital	Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal	Pengembangan sumberdaya kelautan merujuk kebijakan pemerintah dan kelembagaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kelembagaan masyarakat usaha perikanan</li> <li>• Pengembangan potensi pelabuhan perikanan</li> <li>• Pengembangan potensi industri maritim</li> <li>• Restrukturisasi armada perikanan tangkap</li> <li>• Pengembangan informasi dan jaringan pasar</li> </ul>
Transformasi Digital	Masih rendahnya keterampilan Angkatan Kerja	Pengembangan inovasi sarana dan prasarana usaha perikanan berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas SDM masyarakat pesisir dan pengarustamaan gender (PUG)</li> <li>• Penerapan inovasi sarana prasarana usaha perikanan</li> <li>• Penerapan teknologi yang adaptif dan inovatif dalam pengembangan usaha perikanan</li> </ul>

Berdasarkan penelaahan permasalahan jika telah dilakukan penyesuaian dengan tujuan dan sasaran berdasarkan pemetaan program adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Perumusan Program**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Langkah Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Program</b>
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk komoditas unggulan (udang Windu, Rumput Laut) dan komoditas Perikanan lainnya yang berkelanjutan dan didukung oleh inovasi teknologi dan informasi serta Pembinaan yang Inklusif bagi pelaku usaha untuk mendorong produktivitas serta Revitalisasi Wilayah-wilayah yang pernah menjadi pusat produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan secara ekologis dan berbasis kawasan serta pemulihian ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global</li> <li>• Pengembangan pola kemitraan usaha untuk peningkatan daya saing dan nilai tambah produk</li> <li>• Perbaikan sarana dan prasarana produksi perikanan baik pada faktor produksi maupun metode kerja serta Perbaikan standarisasi kualitas produk dari hulu ke hilir</li> </ul>	1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangka 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Meningkatnya konsumsi ikan dan dayasaing produk kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan usaha pengolahan Perikanan dan diversifikasi produk dengan inovasi teknologi olahan yang bermutu dan berdayasaing</li> <li>• Fasilitasi dalam pengembangan jejaring dan akses keuangan serta permodalan dalam rangka perluasan usaha dan penguatan pasar</li> </ul>	1. Pengembangan Hilirisasi Perikanan 2. Inovasi Olahan dan penerapan Standarisasi produk dalam rangka peningkatan imun dan penurunan stunting 3. Peningkatan volume dan nilai produksi hilirisasi perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Penguatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kelautan dan Perikanan	Pengembangan SDM, perluasan usaha dan kemitraan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan	Pengawasan wilayah, pengelolaan dan manfaatan sumberdaya laut serta Koordinasi	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam rangka	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan

sumberdaya kelautan dan perikanan	sumberdaya alam kelautan dan perikanan	dan rjasama, pengelolaan tta pengamanan wilayah t dari pemanfaatan mberdaya kelautan dan Perikanan	penurunan IUU Fishing	Perikanan
		Rehabilitasi ekosistem Pesisir dan Laut, pengendalian dan konservasi kawasan pesisir dan laut serta Penataan dan pengelolaan ruang laut	Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau serta Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Peningkatan Pengawasan kolaborasi Multipihak dan penerapan inovasi teknologi informasi pada sektor kelautan dalam menjaga dan mengawasi perairan laut dalam rangka pengendalian dan pengurangan IUU Fishing	Menjaga Ketersediaan stock ikan dan terkendalinya pemanfaataan SDI yang lestari dan keberlanjutan	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi Ekosistem Pesisir dan Laut serta kelestarian lingkungan pesisir dan laut	Pengembangan inovasi teknologi, edukasi wisata dan eko wisata untuk pengelolaan kawasan konservasi dan daerah perlindungan laut, kelestarian lingkungan serta penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam memelihara Lingkungan pesisir dan Laut	Penataan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Integrasi terhadap dokumen RTRW dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

### 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 merupakan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dan

masyarakat termasuk dunia usaha dalam membangun sinergitas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2023. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya guna mewujudkan pencapaian sasaran program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2023 maka berdasarkan RPJMD Perubahan 2018-2023 diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yaitu :

**Misi ke-5 Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup**

- ❖ Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup.
- ❖ Target Indikator Tujuan : PDRB Hijau
- ❖ Sasaran : Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam.
- ❖ Target Indikator Sasaran Tahun 2023 : Kontribusi PDRB Perikanan 5,6%

Sehingga berdasarkan Misi, tujuan dan capaian sasaran tersebut disusun program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan secara bersama-sama yang saling terkait dan saling memperkuat satu dengan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan Misi satu juga turut menentukan keberhasilan Misi lainnya oleh sebab itu, maka setiap tahun kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan ke dalam Dokumen RKPD sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional.

## 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

Pada tahun 2023 seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun ini juga dilakukan review RPJMD guna melakukan penyesuaian-penesuaian dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya. Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Untuk **tahun 2023 fokus pada Pertumbuhan** dan **pemerataan** pembangunan menjadi satu kesatuan yang diarahkan pada pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat. Kualitas pertumbuhan merupakan pertumbuhan yang mengedepankan unsur pemerataan yang berkeadilan, sedangkan pemerataan pembangunan pada semua sektor pembangunan di kabupaten/Kota berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki setiap daerah; **Kualitas pertumbuhan**

diarahkan pada pertumbuhan sektor unggulan, yang dipicu oleh meningkatnya nilai tambah pengelolaan SDA khususnya pada sektor perikanan dan industri pengolahan, diharapkan memicu pertumbuhan sektor unggulan lainnya. Untuk meningkatkan nilai tambah dalam proses produksi barang dan jasa dibutuhkan dukungan investasi; **Optimalisasi pengeloaan SDA yang berkelanjutan** menekankan pada kelestarian lingkungan hidup, berwawasan lingkungan, dan ramah lingkungan.

- b. Dampak pada sosial ekonomi masyarakat pesisir oleh karena tahun 2023 adalah transisi dampak pasca Pandemi COVID-19. perlu perencanaan dalam rangka pencapaian target akhir Renstra.
- c. Bentuk amanah yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 untuk sektor Perikanan terdapat **program Prioritas yaitu pengembangan komoditas unggulan Rumput Laut dan komoditas lainnya yang bernilai ekonomis dan pengembangan perikanan Tangkap ramah lingkungan dan sumberdaya laut**, dan mensinergikan keterkaitan dengan dokumen RPJMN nasional (Blue Economic) yang telah dituangkan dalam **agenda Nasional**.

### 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

Agar Rencana program kegiatan lebih terarah dan konsisten terhadap dokumen RPJMD dan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka review rancangan awal disajikan dalam bentuk tabel 2.9 atau Tabel C-31 sesuai lampiran permendagri 86 Tahun 2017 dengan dengan memperhatikan :

- Indikator pada program kegiatan agar lebih tajam dan tepat sasaran terutama pada program teknis.
- Penetapan pagu per legiatan harus memperhatikan target indikator jika pagu berkurang maka dilakukan penyesuaian target indikator, perubahan lokasi dan kelompok sasaran.
- Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan

Oleh karena itu terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda dan Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31

**Tabel 2.11**  
**(Tabel T-C 31, sesuai Permendagri 86 Tahun 2017)**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Lembar 1 dari**

Kode			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL AWAL KEBUTUHAN					Catatan Penting		
			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
3	2	5			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			82,295,580,07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				99,520.388,596		
3	2	5	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100 % 60 % 100 %	38.821.212.096	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100 % 60 % 100 %	38.821.212.096	I
3	2	5	01.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	7 Dokumen	1.963.655.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	7 Dokumen	1.963.655.000	
3	2	5	01.0.1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	361.646.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	361.646.800	
3	2	5	01.0.1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	48 Dokumen	14.223.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	48 Dokumen	14.223.100	

3	2 5	01	1. 0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30 Dokumen	16.214.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30 Dokumen	16.214.300	
3	2 5	01	1. 0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	30 Dokumen	17.918.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	30 Dokumen	17.918.000	
3	2 5	01	1. 0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	30 Dokumen	28.673.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	30 Dokumen	28.673.500	
3	2 5	01	1. 0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Dokumen	16.214.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Dokumen	16.214.300	
3	2 5	01	1. 0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	17.918.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	17.918.000	
3	2 5	01 1. 0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Laporan 61	24.758.746.896	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Laporan 61	24.758.746.896	
3	2 5	01	1. 0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	209 Orang/Bulan	24,608.721.896	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	209 Orang/ Bulan	24,608.721.896	

3	2	5	01	1. 0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	
3	2	5	01	1. 0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	16.407.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	16.407.200	
3	2	5	01	1. 0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3.529.800	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3.529.800	
3	2	5	01	1. 0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.405.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.405.000	
3	2	5	01	1. 0 2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	35.770.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	35.770.000	
3	2	5	01	1. 0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	87.913.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	87.913.000	
3	2	5	01	1. 0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	

<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>01</b>	<b>1.</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	<b>1 Laporan</b>	<b>63.810.700</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	<b>1 Laporan</b>	<b>63.810.700</b>	
3	2	5	01	1.	0	3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.690.700	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.690.700	
3	2	5	01	1.	0	3	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	54.660.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	54.660.000	
3	2	5	01	1.	0	3	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	6.460.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	6.460.000	
3	2	5	01	1.	0	3	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	
3	2	5	01	1.	0	3	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	
3	2	5	01	1.	0	3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	
3	2	5	01	1.	0	3	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	

3	2	01	1.	4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah perangkat daerah	1 Laporan	30.040.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah perangkat daerah	1 Laporan	30.040.000		
3	2	01	1.	0	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	30.040.000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	30.040.000		
3	2	01	1.	0	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Dokumen	0	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Dokumen	0		
3	2	01	1.	0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 persen	484.248.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100 persen	484.248.200		
3	2	01	1.	0	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	23.780.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	23.780.000		
3	2	01	1.	0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	209 Paket	333.610.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	209 Paket	333.610.000		
3	2	01	1.	0	03	Pendaataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendaataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.246.000	Pendaataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendaataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.246.000		
3	2	01	1.	0	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.202.400	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.202.400		

3	2	5	01	1. 0 5	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	57.090.700	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	57.090.700		
3	2	5	01	1. 0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0		
3	2	5	01	1. 0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	58.319.100	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	58.319.100		
3	2	5	01	1. 0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0		
3	2	5	01	1. 0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.907.494.830	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi administrasi umum perangkat daerah	100 persen	1.907.494.830		
3	2	5	01	1. 0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	30.647.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	30.647.600		
3	2	5	01	1. 0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	826.939.030	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	826.939.030		
3	2	5	01	1. 0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	93.555.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	93.555.000		

3	2 5	01	1. 0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	
3	2 5	01	1. 0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	104.102.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	104.102.900	
3	2 5	01	1. 0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.735.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.735.500	
3	2 5	01	1. 0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	698.245.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	698.245.800	
3	2 5	01	1. 0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.269.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.269.000	
3	2 5	01	1. 0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	
3	2 5	01 1. 0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Unit	153.102.360	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Unit	153.102.360	
3	2 5	01	1. 0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	

3	2	5	01	1. 0 7	05	Pengadaan Mebel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	53.102.360	Pengadaan Mebel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	53.102.360	
3	2	5	01	1. 0 7	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100,000,000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100,000,000	
3	2	5	01	1. 0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
3	2	5	01	1. 0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
3	2	5	01 1. 0	8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>2 Jenis</b>	<b>4,717,482,391</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>2 Jenis</b>	<b>4,717,482,391</b>	
3	2	5	01	1. 0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	
3	2	5	01	1. 0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.459.372.135	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.459.372.135	
3	2	5	01	1. 0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	

3	2 5	01	1. 0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.710.395.644	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.710.395.644		
3	2 5	01 1. 0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	30 Unit	3.290.346.331	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	30 Unit	3.290.346.331		
3	2 5	01	1. 0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	1.977.276.531	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	1.977.276.531		
3	2 5	01	1. 0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	133.169.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	133.169.800		
3	2 5	01	1. 0 9	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000		
3	2 5	01	1. 0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.129.900.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.129.900.000		

3	2 5	01	1. 0 9	10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	0 Unit	0	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	0 Unit	0		
3	2 5	01	1. 0 9	11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	0 Unit	0	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	0 Unit	0		
3	2 5	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikananCakupa n luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutanJuml ah produksi garam rakyat	<b>100% 67,31% 48.450Ton</b>	<b>11,969,196,200</b>	<b>PROGRAM PENGELOL AAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL</b>		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Jumlah produksi garam rakyat	<b>100% 67,31% 48.450Ton</b>	<b>11,969,196,200</b>		
3	2 5	02 1. 0	1		<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>		Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	<b>56,45 Ha 21 Unit</b>	<b>11.642.290.100</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>		Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	<b>56,45 Ha 21 Unit</b>	<b>11.642.290.100</b>		

				Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3	2 5	02	1. 0 1	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1038850.36 Ha	692.365.000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1038850.36 Ha	692.365.000		
3	2 5	02	1. 0 1	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	56.45 Ha	10.028.792.100	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	56.45 Ha	10.028.792.100

3	2	5	02	1. 0	2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah dokumen teknis pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi	Dokumen Rekomendasi	1,830,000	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah dokumen teknis pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi	Dokumen Rekomendasi	1,830,000		
3	2	5	02	1. 0	2	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Rekomendasi	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Rekomendasi	0	
3	2	5	02	1. 0	2	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	4 Rekomendasi	1,830,000	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	4 Rekomendasi	1,830,000	
3	2	5	02	1. 0	2	03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	
3	2	5	02	1. 0	2	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	

3	2 5	02	1. 0 2	05	Pencatatan dan Pengadминистраsian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	0 Dokumen	0	Pencatatan dan Pengadминистраsian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	0 Dokumen	0		
3	2 5	02 1. 0	3		<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>		Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	<b>24 Unit</b>	<b>919.303.000</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>		Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan	<b>24 Unit</b>	<b>919.303.000</b>		
3	2 5	02	1. 0 3	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	218.610.000	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	218.610.000		

					Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Pangajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	10 Kelompok	673.050.000	Penguatan dan Pengembang an Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Pangajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	10 Kelompok	673.050.000	
3	2 5	02	1. 0 3	02	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	27,643,000	Pemberian Pendampinga n, Kemudahan n Akses Ilmu Pengetahuan , Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggar aan Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	27,643,000

3	2	5	03		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Cakupan bina kelompok nelayanJumlah produksi perikanan tangkapNilai Hilirisasi Produksi Perikanan TangkapPersentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasionalPersentase Produksi perikanan kelompok nelayan	<b>67,31% 413.030,8 Ton Rp. 9.210,12 M 78,95% 27,17%</b>	<b>36.133.269.400</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah produksi perikanan tangkap Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	<b>67,31% 413.030,8 Ton Rp. 9.210,12 M 78,95% 27,17%</b>	<b>36.133.269.400</b>			
3	2	5	03	1.	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	<b>287 Unit</b>	<b>15,523,425,000</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	<b>287 Unit</b>	<b>15,523,425,000</b>			
3	2	5	03	1.	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0 Dokumen	0	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0 Dokumen	0

3	2	03	1.	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Jeneonto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Kepulauan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	17 unit	7.411.690.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Jeneonto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	17 unit	7.411.690.000	
---	---	----	----	----	--	--	---	---------	---------------	--	---	---	---------	---------------	--

				Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKot a Palopo,Semu a KelurahanKa b. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					KelurahanK ab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ota Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ota Palopo,Sem ua KelurahanK ab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

3 25 03	1 .0 1 0 3		Penjaminan Ketersediaan SaranaUsaha Perikanan Tangkap	Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Pangkajene Kepulauan,	510 unit	4.638.953.000	Penjaminan Ketersediaan SaranaUsaha Perikanan Tangkap	Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Pangkajene Kepulauan,	510 unit	4.638.953.000	
------------	------------------------	--	---	---	----------	---------------	---	---	----------	---------------	--

					Semua KelurahanKab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Palopo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Semua KelurahanKab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Palopo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3	2	03	1.	2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan	15 Unit	207.004.500	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan	15 Unit	207.004.500		
3	2	03	1.	02	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0 Dokumen	0	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0 Dokumen	0
3	2	03	1.	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0 Unit	0	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0 Unit	0

3	2	5	03	1. 0 2	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Gowa, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKa b. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	15 Unit	207.004.500	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanK ab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	15 Unit	207.004.500
3	2	5	03 1. 0	3		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100 Rekomend asi	18.389.800	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100 Rekomendasi	18.389.800	
3	2	5	03	1. 0 3	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang	0 Dokumen	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang	0 Dokumen	0

					sampai dengan 30 GT			Menjadi Kewenangan Provinsi			Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			Menjadi Kewenangan Provinsi				
3	2 5	03	1. 0 3	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	100 Rekomendasi	18.389.000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	100 Rekomendasi	18.389.000				
3	2 5	03	1. 0 3	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Dokumen	0	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Dokumen	0				
3	2 5	03 1. 0	4		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil</b>		Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	0 rekomenda si	0	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil</b>		Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	0 rekomendasi	0				
3	2 5	03	1. 0 4	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0				

				oleh Nelayan Kecil				Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil						
3	2 5	03	1. 0 4	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	0 Rekomenda si	0	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0
3	2 5	03 1. 0	5		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Tanda Daftar Kapal yang telah diterbitkan	0 Laporan	0	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Tanda Daftar Kapal yang telah diterbitkan	0 Laporan	0
3	2 5	03	1. 0 5	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0

3	2 5	03	1. 0 5	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	0 Dokumen	0	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	0 Dokumen	0		
3	2 5	03 1. 0	6		<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>		Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	<b>5 Unit</b>	<b>23.857.232.100</b>	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>		Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	<b>5 Unit</b>	<b>23.857.232.100</b>		
3	2 5	03	1. 0 6	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	5 Lokasi	51.000.000	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	5 Lokasi	51.000.000		
3	2 5	03	1. 0 6	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Pelabuhan Perikanan	23.634.011.500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Pelabuhan Perikanan	23.634.011.500		
3	2 5	03	1. 0 6	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	172.220.600	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	172.220.600		
3	2 5	03 1. 0	7		<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>		Jumlah rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	<b>0 rekomen dasi</b>	<b>0</b>	<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>		Jumlah rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	<b>0 rekomen dasi</b>	<b>0</b>		
3	2 5	03	1. 0 7	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi	0 Dokumen	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi	0 Dokumen	0		

				Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kelurahan	Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kelurahan	Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi				
3	2 5	03	1. 07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0
3	2 5	03 1. 0	8	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan & Kapal Pengangkut dgn Ukuran Sampai dgn di Laut,Sungai,Danau,Waduk dan Genangan air lainnya dapat di usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	0 Rekomendasi	0	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan & Kapal Pengangkut dgn Ukuran Sampai dgn di Laut,Sungai,Danau,Waduk dan Genangan air lainnya dapat di usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	0 Rekomendasi	0	

3	2 5	03	1. 0 8	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0
3	2 5	03	1. 0 8	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Rekomenda si	0	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Rekomendasi	0
3	2 5	03 1. 0	9		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	0 Laporan	0	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	0 Laporan	0
3	2 5	03	1. 0 9	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0
3	2 5	03	1. 0 9	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	0 Rekomenda si	0	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0

					dengan 30 GT								
3	2 5	03 1. 1	0	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pendaftar Perikanan Berukuran Sam Dengan 10 GT yang Berop Laut,Sungai,dana u,waduk, Genangan air Lainnya Dap diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	0 Laporan	0,000	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pendaftar Perikanan Berukuran Sam Dengan 10 GT yang Berop Laut,Sungai,dana u,waduk, Genangan air Lainnya Dap diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	0 Laporan	0,000		
3	2 5	03 1. 1 0	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0
3	2 5	03 1. 1 0	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	0 Rekomenda si	0	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0

				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya Persentase ketersediaan benur berkualitas	<b>4.298.391,1 Ton Rp. 15.958,39 M 100%</b>	<b>7.124.746.500</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya Persentase ketersediaan benur berkualitas	<b>4.298.391,1 Ton Rp. 15.958,39 M 100%</b>	<b>7.124.746.500</b>	
3	2 5	04		<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dal (satu) daerah Provinsi	0 rekomen dasi	0	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dal (satu) daerah Provinsi	0 rekomen dasi	0	
3	2 5	04 1. 0	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomenda si	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi
3	2 5	04 1. 0 1	01	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomenda si	0	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi
3	2 5	04 1. 0 1	02	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	0 Dokumen	0	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	0 Dokumen
3	2 5	04 1. 0	2	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang</b>	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang ditertibkan di	0 rekomen dasi	0	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang</b>	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang ditertibkan di	0 rekomen dasi	0	

					<b>Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>		Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing			<b>Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>		Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing		
3	2 5	04	1. 0 2	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomenda si	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0
3	2 5	04	1. 0 2	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomenda si	0	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	0 Rekomendas	0
3	2 5	04 1. 0	1. 0 3	03	<b>Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>		Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan	0 rekomen da si	0	<b>Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>		Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan	0 rekommendasi	0
3	2 5	04	1. 0 3	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin	Semua Kab/Kota, Semua	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan	0 Rekomenda si	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur	Semua Kab/Kota, Semua	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan	0 Rekomendasi	0

				Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan		Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan				
3	2 5	04	1. 0 3	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	0 Rekomenda si	0	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0
3	2 5	04	1.0	4	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi	10 Laporan	750,000	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi	0 Laporan	0
3	2 5	04	1. 0 4	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Rekomenda si	0	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Rekomendasi	0
3	2 5	04	1. 0 4	02	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Rekomenda s	0	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Rekomendas	0

				dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			ota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>04</b>	<b>1.</b>	<b>5</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	<b>133 Unit</b>	<b>7.124.746.500</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>		Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	<b>133 Unit</b>	<b>7.124.746.500</b>		
3	2	04	1.	05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0
3	2	04	1.	05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	130 Unit	3.095.477.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	130 Unit	3.095.477.000
3	2	04	1.	05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	50.006.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	50.006.000
3	2	04	1.	05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	13 Dokumen	47.840.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	13 Dokumen	47.840.000

3	2 5	04	1. 0 5	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi (laporan)	30 Orang	49.800.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pembudidaya	30 Orang	49.800.000		
3	2 5	04 1. 0	6		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>		Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar	<b>150 Unit</b>	<b>4.029.269.500</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>		<b>Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar</b>	<b>150 Unit</b>	<b>4.029.269.500</b>		
3	2 5	04	1. 0 6	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18 Unit	3.371,965.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18 Unit	3.371,965.000		

3	2	04	1.	02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 unit	657.304.500	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 unit	657.304.500
---	---	----	----	----	--	--	--	----------	-------------	--	--	--	----------	-------------

					Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab . Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

3	2 5	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	89,85 %	4.306.335.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	89,85 %	4.306.335.000	
3	2 5	05 1. 0	1		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	9 Unit usaha	4.268.230.000	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	9 Unit usaha	4.268.230.000	
3	2 5	05 1. 0 1	1. 0 1	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis Biota laut yang dilindungi (jenis), Jumlah peserta koordinasi teknis pengawasan dan pengendalian SDKP (orang), Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok), Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok) Jumlah laporan pengawasan terpadu (laporan)	1 Dokumen	77.555.100	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	77.555.100	
3	2 5	05 1. 0 1	1. 0 1	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha perikanan tangkap yang mendapatkan Pengawasan IUU Fishing dan Pemantauan Kapal Perikanan (unit), Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (unit), Jumlah peserta sosialisasi dan kepatuhan	7 Dokumen	3.363.856.900	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	7 Dokumen	3.363.856.900	

					terhadap peraturan dan regulasi [orang]									
3	2 5	05	1. 0 1	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil yang mendapatkan pengawasan (unit )	1 Dokumen	17.830.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	17.830.000
3	2 5	05	1. 0 1	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmaswas yang diberdayakan (Kelompok)	30 Kelompok	218.840.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	30 Kelompok	218.840.000
3	2 5	05 1. 0		2	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	2 Unit	38.105.000	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	2 Unit	38.105.000
3	2 5	05	1. 0 2	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	10.060.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	10.060.000

					Sesuai dengan Kewenangannya		Sesuai dengan Kewenangannya		ota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya		Sesuai dengan Kewenangannya			
3	2 5	05	1. 0 2	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	10.860.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	10.860.000
3	2 5	05	1. 0 2	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	17.185.000	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	17.185.000

3	2 5	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp. 317,28 M 100 % 5.544.1Ton	5.500	1.492.53	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp. 317,28 M 100 % 5.544.1Ton	1.492.535.50 0		
3	2 5	06 1. 0	1		<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	0 rekomen dasi	0		<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	0 rekomen dasi	0		
3	2 5	06 1. 0 1	01		<b>Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	0 Rekomenda si	0	<b>Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	0 Rekomendasi	0	
3	2 5	06 1. 0 1	02		<b>Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	0 Rekomenda si	0		<b>Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	0 Rekomendasi	0		

					dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			ota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
3	2 5	06	1. 0 1	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	0	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	0 Dokumen	0
3	2 5	06 1. 0	2		<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>		Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Unit usaha	<b>1.491.784.100</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>		<b>Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	Unit usaha	<b>1.491.784.100</b>
3	2 5	06	1. 0 2	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai		491.784.100	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai		491.784.100

					Skala Usaha dan Risiko				Skala Usaha dan Risiko			
3	2 5	06	1. 0 2	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	1.000.000.000	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	1.000.000.000
3	2 5	06 1. 0		3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah laporan Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan	2 Laporan  751.400	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah laporan Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan	2 Laporan  751.400
3	2 5	06	1. 0 3	01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen  351.400	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen  351.400

3	2	06	1.	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	400.000	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	400.000	
<b>TOTAL</b>													<b>TOTAL</b>	<b>99,520.388,596</b>	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan pemangku kepentingan telah disesuaikan dengan isu strategis dan permasalahan yang ada dan memenuhi beberapa indikator yang belum mencapai target. Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan. Berdasarkan Forum OPD terdapat beberapa usulan dari OPD Kabupaten/Kota sehingga dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel .2.5.**  
**(Tabel T-C.32 Sesuai lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PPK		Nilai Hilirisasi produksi garam	Rp.85.94 Milyar	
		Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	1038850.3 6 Ha	
		Jumlah produksi garam rakyat	99.965 ton	
		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan	23,91%	
Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi (unit)	21 Unit	
		Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi (Ha)	55 Ha	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur, Maros, Takalar, Pangkep	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	64 Ha	Penanaman Mangrove Dilengkapi dengan Proposal Desa

<b>Program / Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran / Volume</b>	<b>Catatan</b>
	Kabupaten Luwu, Wajo, Pangkajene Kepulauan, Maros dan Kota Makassar		0.12 Ha	Usulan Apartemen Ikan agar dilengkapi dengan proosal desa/proposal kelompok
	Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Takalar, Kepulauan Selayar, Maros		0.074 Ha	Usulan Transplantasi Karang /artificial Reef
	Kabupaten Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, Kepulauan Selayar dan Kota Makassar		6 Unit	Usulan Pembangunan Tambatan Perahu agar dilengkapi proposal desa
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan (kelompok)		
		Jumlah sarana dan prasarana masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil		
Sub Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kabupaten Jenpeonto	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	Usulan agar dilengkapi proposal kelompok

<b>Program / Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran / Volume</b>	<b>Catatan</b>
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kabupaten Takalar	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	Usulan sarana inovasi usaha garam , agar dilengkapi proposal kelompok
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Selayar	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	Usulan sarana inovasi usaha garam , agar dilengkapi proposal kelompok
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap	Rp. 9.210,12 Milyar	
		Jumlah produksi perikanan tangkap	413.030,8 Ton	
		Cakupan bina kelompok nelayan	30.25%	
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	27.17%	
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	78,95 %	
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				

<b>Program / Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran / Volume</b>	<b>Catatan</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Makassar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Maros, Luwu Timur, Bone, Sinjai, Jeneponto			
Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Makassar, Palopo, Kabupaten Barru, Pangkep, Luwu, Maros, Luwu Utara, Takalar, Bone, Barru, Sinjai, Wajo,			
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat di Usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) derah Provinsi				
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kabupaten Soppeng			
Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah pelabuhan yang ditetapkan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (unit)		
		Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola		

<b>Program / Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran / Volume</b>	<b>Catatan</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PPI Macini Baji Kabupaten Pangkajene Kepulauan, PPI Cempae Kota Pare Pare	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	2 Unit	Usulan fasilitas fungsional Pelabuhan agar disesuaikan dengan dokumen perencanaan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya</b>	<b>Rp. 15.958,39 Milyar</b>	
		<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>4.298.391, 1 Ton</b>	
		<b>Persentase ketersediaan benur berkualitas</b>	<b>100%</b>	
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar	150 Unit	
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Pare Pare Kabupaten Maros, Takalar, Soppeng	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18 Unit	

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Takalar	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150 Unit	
<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>			<b>133 Unit</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Kabupaten Pangkep, Bone, Jeneponto, Takalar, Luwu Utara, Wajo, Luwu, Palopo, Bantaeng, Maros	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	130 Unit	Sarana Budidaya Rumput Laut
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil				
Sub Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	Usulan berupa sarana pengawasan bagi POKMASWAS, agar dilengkapi dengan proposal kelompok

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan		
		Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi		
		Persentase pengujian mutu produk perikanan		
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang berdayasaing (unit usaha)		
		Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (unit usaha)		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	Usulan agar dilengkapi proposal kelompok

Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kabupaten Takalar, Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	5 Angkatan	Usulan Pertemuan Inovasi Produk Untuk UMKM, Pengadaan Bahan Kimia Pengujian UPT PBAPL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100 %	
		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	100 %	
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	60%	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar, Kabupaten Barru	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Usulan E Proposal Kelautan dan Perikanan dan Penyediaan Benih UPT PBAPL
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bone, Barru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	Rehab Gedung Kantor CDK Bosowasi Rehab Kantor UPT PBAPL

		Dipelihara/Direhabilitasi		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Usulan Roller Blind

Usulan yang telah disampaikan pada Forum OPD untuk kabupaten/kota sebanyak 56 usulan dan Pokok-Pokok Pikiran sebanyak 231 usulan. Usulan ini akan menjadi rancangan awal Rencana Kerja tahun 2023 namun usulan tersebut masih perlu dilengkapi data dukung.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun identifikasi kebijakan nasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

**Tabel. 3.1.  
Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Kebijakan Nasional	Keterangan
1.	Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan	Major Project
2.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Pesisir	Major Project
3.	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Perbenihan Air Payau dan Tawar	Major Project
4.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	Major Project
5.	Peningkatan Daya Saing dan Mutu Produk	Major Project
6.	Penurunan Stunting, Pengarustamaan Gender dan SDGs (Kemiskinan, Pelestarian dan Pemanfaatan ekosistem laut)	Kebijakan Nasional – Internasional
7.	Ekonomi Biru	Kebijakan Nasional – Internasional

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 pada RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada akhir periode sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun 2021 juga dilakukan review RPJMD sesuai OPD baru guna melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya.

Berdasarkan tema ini, maka ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sbb:

- Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui Hilirisasi Perikanan dan peningkatan Sarana Prasarana dari Hulu ke Hilir dalam rangka penanganan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat pesisir pasca pandemik COVID-19;
- Pengembangan Inovasi Teknologi produk hasil perikanan sehingga dapat berkompetisi dan berdaya saing;
- Pengembangan hilirisasi produk kelautan dan perikanan yang inklusif dan berkarakter;
- Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Perencanaan Strategis Tahun 2018-2023 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai untuk tahun 2023 yaitu :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Pendek Pelayanan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2023**

NO	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2023	PELAKSANA KINERJA
-1	-2	-3	-4	-5
1	<b>Tujuan</b> : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi OPD	75,60	
1.1	<b>Sasaran</b> : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,41	Kepala Dinas
		Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah (%)	99	
		Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100	
a.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah (%)	100	Sekretaris, Eselom III UPT dan CDK
		Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik (%)	100	
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP (%)	10,53	
2	<b>Tujuan</b> : Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan	Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (%)	11,8	
2.1	<b>Sasaran</b> : Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%) Produksi Perikanan (ton)	5,6 4.759.871,9	Kepala Dinas

<b>NO</b>	<b>TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA PADA TAHUN 2021</b>	<b>PELAKSANA KINERJA</b>
<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)	9.210,12	Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III)
		Produksi perikanan tangkap (ton)	413.030,8	
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%)	78,95	Kepala Bidang Perikanan Tangkap , Kepala UPT Pelabuhan Wilayah I dan II (Eselon III)
b.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya (Rp.M)	15.958,39	Kepala Bidang Perikanan Budidaya (Eselen III)
		Produksi perikanan budidaya (ton)	4.298.391,1	
		Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)	100	Kepala UPT BPAPL (Eselon III)
c.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Produksi garam rakyat (ton)	47.500	Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan P3K (eselon III)
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan (%)	74,08	Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan P3K dan Kepala CDK (eselon III)
2.2	<b>Sasaran : Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan</b>	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	<b>65.90</b>	<b>Kepala Dinas</b>
a.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai hilirisasi produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (Rp. M)	317.28	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, dan Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
		Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (ton)	5.544,1	
		Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan (%)	100	
2.3	<b>Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan</b>	Nilai Tukar Nelayan	103.19	Kepala Dinas
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	30,25	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	27.17	

<b>NO</b>	<b>TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA PADA TAHUN 2021</b>	<b>PELAKSANA KINERJA</b>
<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>
3	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Potensi penurunan emisi GRK (juta ton CO2) dari sektor perikanan	0.7	
3.1	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	1.03	Kepala Dinas
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	1,09	
		Prosentase Penurunan tindakan IUU Fishing (%)	42.44	
a.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PPK	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	67,31	Kepala Bldang Penataan Ruang Laut Pesisir dan P3K dan Kepala CDK (Eselon III)
b.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	89,85	Kepala Bldang Pengawasan SDKP dan Kepala CDK (Eselon III)

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;  
Tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam tatakelola administrasi pemerintahan baik dari segi perencanaan, penganggaran, pengelolaan administrasi PAD, pemeliharaan asset, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor dst. Sehingga perlu dilakukan penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, pada organisasi agar ke depan lebih berkinerja baik dan sesuai pencapaian target indeks reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk komoditas unggulan kelautan dan perikanan;  
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan, sektor perikanan merupakan sub sektor lapangan usaha pertanian pada pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB). Sehingga dalam mewujudkan tujuan ini, terdapat beberapa indikator yang menjadi sasaran pencapaian kinerja tujuan yaitu peningkatan produksi perikanan dan meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian Sulawesi Selatan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir agar pendapatannya dapat meningkat terutama pada bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan.

Pemberdayaan tersebut dalam bentuk pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan berbasis wilayah dan Kawasan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi agar pembangunan dapat berkelanjutan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga jika daya beli masyarakat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan maka permasalahan angka stunting dan angka kemiskinan akan menurun.

3. Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan;

Kondisi laut dan perairan di provinsi Sulawesi Selatan cukup memprihatinkan karena terumbu karang, mangrove dan padang lamun sudah banyak yang rusak akibat aktivitas kegiatan pembangunan. Kemudian adanya kebijakan pemerintah terkait penangkapan ikan terukur, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terkait penangkapan ikan yang menggunakan bahan dan alat tangkap yang dilarang, kemudian kepatuhan pelaku usaha terhadap dokumen izin usaha agar stok ikan kita tetap terjaga dan lestari. Kemudian dalam rangka mendukung kebijakan global terkait emisi karbon maka peran konservasi Kawasan mangrove menjadi agenda pembangunan di tahun 2023. Selain itu perdagangan karbon menjadi target pada tahun 2023 mengingat aksi rehabilitasi mangrove cukup masif dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Agar arah pembangunan terintegrasi dengan **Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan** maka sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 hubungan tujuan dan sasaran saling mendukung dan terkait satu sama lain yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel . 3.3**  
**Hubungan Tujuan dan Sasaran RKPD dengan RENJA Dinas Tahun 2023**

No	RKPD		Renja	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	1.1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	1.Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1.1Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
2	Mengoptimalkan pengelolaan Sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan	2.1.Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam	2.Meningkatkan produksi dan nilaitambah produk perikanan yang berdaya saing	2.1.Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktorproduksi dan produktivitas produksi 2.2Meningkatnya

	kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup			konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan 2.3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan
	2.2.Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	2.2.Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	2.2.Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	2.1Meningkatnya kelestariandand pengendalian pemanfaatan sumberdayaalam kelautan dan perikanan

Sedangkan Target Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selaras dengan sasaran pembangunan jangka pendek tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.4

**Tabel 3.4**  
**Sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Dinas Kelautan Dan Perikanan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Indikator	Target Capaian Tahun 2023	Formulasi	Pengukuran Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>SS1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan</b>				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,41	Lembar Hasil Evaluasi	Permenpan
2	Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah (%)	99	Lembar Hasil Evaluasi	Permenpan
3	Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100	Lembar Hasil Evaluasi	Permenpan
<b>SS2.1 Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas perikanan</b>				
1	Produksi Perikanan (ton)	4.759.871,9	Produksi Perikanan = Tpt + Tpb (Jumlah produksi perikanan tangkap dan budaya)	BPS
3	Kontribusi PDRB Perikanan (%)	5,6	(PDRB perikanan /PDRB Daerah)x100%	BPS
<b>SS2.2 Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan</b>				
1	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	65.90	AKI = A + B + C dimana A = Konsumsi di Rumah Tangga B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat	BPS
<b>SS2.3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan</b>				
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103.19	Indeks yang diterima nelayan x 100% Indeks yang dibayar nelayan	BPS
<b>SS3.1 Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan</b>				
1	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	1,09	Kawasan Lindung Perairan x 100% Total Luas Perairan Teritorial	DKP (data olahan)
2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	42.44	Jumlah Tangkapan Ikan x100 Total Luas Perairan Teritorial	DKP(data olahan)
3	Prosentase Penurunan Tindakan IUU Fishing (%)	35,71	Jumlah kasus yang ditangani tahun (n) – Jumlah kasus yang ditangani tahun (n-1) x100 Jumlah kasus yang ditangani tahun (n)	DKP(data olahan)

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan, maka ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Dalam rangka Hilirisasi Perikanan tetap diarahkan dukungan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan pada perikanan Budidaya dan perikanan Tangkap, Pengembangan perikanan tangkap ramah lingkungan, Pengembangan Pelabuhan Perikanan, Pengolahan dan Perluasan Pasar Produk Perikanan, Pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Perbaikan mutu dan daya saing produk kelautan dan perikanan, Pembinaan para pelaku usaha kelautan dan perikanan serta Kemitraan pelaku dengan sumber inovasi dalam rangka peningkatan produksi
2. Penataan Sistem dan Manajemen pada Pengembangan Komoditas dan produk unggulan dari Hulu ke Hilir dengan berorientasi pada aspek sosial ekonomi, Pengembangan konektivitas dan infrastruktur, Pengembangan Usaha, akses keuangan dan Investasi, Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk, Pengembangan IPTEK dan SDM, Pemberdayaan masyarakat, Fasilitasi Pengembangan Wirausaha dan Fokus pada Pengarusutamaan Gender.
3. Penataan dan Peningkatan Manajemen dalam Pelaksanaan program kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan dan mengacu pada NSPK Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
4. Pembangunan kemaritiman diarahkan penatakelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengembangan infrastruktur.
5. Kesepakatan dalam pencapaian target indikator terutama pada peningkatan Produksi Perikanan, Garam, Produksi Olahan dan penurunan tindakan IUU Fishing dalam rangka mendukung persentase kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berlandaskan hasil rekomendasi evaluasi SAKIB – RB oleh Kementerian PAN RB maka pada tahun 2023 dilakukan perbaikan dalam penentuan pohon kinerja sehingga berdasarkan hasil perbaikan dalam penyusunan *Critical Succes Factor* maka dalam menyusun cascading dan pohon kinerja terdapat penyesuaian pada level program dan outcomes hingga level kegiatan sehingga dapat dipetakan antara program sesuai permendagri 90 tahun 2020 seperti pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Pemetaan Program/Kegiatan sesuai Critical Success Factor**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM sesuai Permendagri 86 tahun 2017</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Program berdasarkan CSF</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>
1.1	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,41		
		Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah (%)	99		
		Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100		
a.		Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Percentase realisasi kegiatan perangkat daerah (%)	Perencanaan yang SMART	Persentase kualitas dokumen (%)
				Pelaporan tepat waktu dan akuntabel	Persentase kualitas Laporan (%)
			Percentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik (%)	Penerapan manajemen RB	Nilai Capaian RB
			Percentase penurunan temuan berdasarkan LHP (%)	Penurunan temuan berdasarkan LHP	Persentase penurunan temuan (%)
2.1	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	5.6		
		Produksi Perikanan (ton)	4.759.871,9		
		Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)	Penguatan kelembagaan dan restrukturisasi sarana prasarana perikanan tangkap	Produksi Perikanan tangkap (ton)
			Produksi perikanan tangkap (ton)		
			Percentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%)		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya (Rp.M)	Diseminasi dan Inovasi Pengelolaan Produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (%)
			Produksi perikanan budidaya (ton)		

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM sesuai Permendagri 86 tahun 2017</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Program berdasarkan analisis CSF</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>
			Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)		
C.		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Produksi garam rakyat (ton)	Intensifikasi pengelolaan usaha garam	Produksi garam (ton)
			Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan (%)	Produk hasil perikanan berdaya saing	Persentase produk yg berdaya saing (%)
				Produk perikanan yang sesuai standar ekspor bertambah	Rasio produk perikanan yang sesuai standar ekspor (%)
				Pelayanan dan pembinaan mutu dan standar produk meningkat	Persentase Unit Usaha perikanan yang terlayani (%)
2.2	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	65,9		
				<b>Produk yang berdaya saing</b>	<b>10%</b>
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai hilirisasi produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (Rp. M)	Mutu produk hasil perikanan	Persentase pembinaan mutu produk (%)
			Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi (ton)	Pangan ikan yang aman dikonsumsi	produksi olahan ikan konsumsi (ton)
			Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan (%)	Inovasi dan Diversifikasi Produk	Persentase produk inovasi dan diversifikasi
				Kemitraan usaha dalam memasarkan produk	Persentase kemitraan usaha (%)
2.3	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan	103,19		
a.		Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	Penyediaan Sarana dan prasarana yang memadai	Persentase produksi perikanan Kelompok nelayan (%)
			Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	Pembinaan kelompok usaha kelautan dan perikanan	Persentase Cakupan Bina Kelompok (%)

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM sesuai Permendagri 86 tahun 2017</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Program berdasarkan analisis CSF</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>
3.1	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kelestarian pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan perikanan	Rasio kawasan lindung perairan dan terhadap total luas perairan territorial (%)	1.09		
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	42,44		
		Prosentase Penurunan tindakan IUU Fishing (%)	35,71		
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PPK	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	Pengelolaan Kawasan lindung perairan	Persentase kawasan lindung perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)
				Pengelolaan Ekosistem pesisir dan laut	Persentase Luasan ekosistem pesisir dan laut yang dikelola secara berkelanjutan (%)
b.		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	Hasil tangkapan sumberdaya ikan dalam batas aman	Persentase hasil tangkapan SDI yang sesuai MSY (%)
				Stock sumberdaya perikanan bertambah	Persentase sumberdaya ikan yang direstocking (%)
				Sarana dan prasarana yang memadai dalam pengawasan Pembinaan masyarakat tentang IUU Fishing	Persentase sarpras pengawasan yang memadai (%) persentase masyarakat yang patuh (%)

Berdasarkan hasil pemetaan bahwa pada sasaran meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah terdapat 1 program sesuai permendagri 90 tahun 2020 dan pada hasil analisis CSF terdapat 4 program, selanjutnya pada sasaran meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi terdapat 3 program sesuai permendagri 90 tahun 2020 dan pada hasil analisis CSF terdapat 5 program, selanjutnya pada sasaran meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan terdapat 1 program sesuai permendagri 90 tahun 2020 dan pada hasil analisis CSF terdapat 4 program, selanjutnya pada sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan terdapat 1 program sesuai permendagri 90 tahun 2020 dan pada hasil analisis CSF terdapat 2 program, selanjutnya pada sasaran meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan terdapat 2 program sesuai permendagri 90 tahun 2020 dan pada hasil analisis CSF terdapat 5 program.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan tahun 2023 telah sesuai dengan RPJMD Perubahan dan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan hal sebagai berikut

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam mendukung :
  - Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  - Pencapaian SDGs,
  - Pengentasan kemiskinan,
  - Pencapaian Pelayanan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan
  - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dalam rangka implementasi Ekonomi Biru di Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2023, antara lain meliputi :
  - Jumlah program sebanyak 6 Program dan jumlah kegiatan sebanyak 22 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 72 sub kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan tersebar pada program prioritas Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kemudian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya kemudian dalam rangka mendukung Hilirisasi didukung oleh Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan untuk menjaga kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan didukung oleh Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan untuk mendukung Operasional kegiatan didukung oleh Program Penunjang Administrasi.dengan uraian sebagai berikut :
    1. **Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,**  
Diarahkan pada : 1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, 2) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, 3) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

- 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap,**  
Diarahkan pada : 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil, 2) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 3) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, 4) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi, 5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- 3. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya,**  
Diarahkan pada : 1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat, 3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**  
Diarahkan pada : 1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil, 2) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- 5. Program Pengolahan dan Pemasaran produk perikanan,**  
Diarahkan pada 1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, 2) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- 6. Program Penunjang Adminsitrasи**  
Diarahkan dna Fokus pada Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya : 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 10)

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah **Rp. 110.739.562.704,-** sesuai pagu Renstra Perubahan 2018-2023) sedangkan pagu indikatif yang dibahas oleh TPAD sebesar **Rp. 99.520.388.596** dengan rincian anggaran per program .yaitu :

No	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	FOKUS
1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<b>Rp. 11.642.290.100</b>	Pengembangan Usaha Garam dan Sarpras Pendukung Produksi serta Rehabilitasi Kawasan pesisir
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	<b>Rp. 36.133.269.400</b>	Peningkatan Pendapatan dan pemberdayaan Nelayan, penyediaan prasarana Alat Tangkap Ramah Lingkungan serta pengembangan Pelabuhan perikanan
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	<b>Rp. 7.124.746.500</b>	Diseminasi Inovasi Teknologi Budidaya Rumput Laut, sarana budidaya mendorong ketahanan pangan dalam rangka penurunan stunting
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<b>Rp. 1.492.535.500</b>	Pengembangan Inovasi dan penerapan Standar dan Kelayakan Produk serta peningkatan kapsitas POKLASHAR
5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	<b>Rp. 4.306.335.000</b>	Pengendalian dan Menjaga kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
6	Program Penunjang Adminsitrasni	<b>Rp. 38.821.212.096</b>	Gaji dan Tunjangan, Dukungan Manajemen Operasional Program Kegiatan Teknis dan Rutin
	JUMLAH	<b>Rp. 99.520.388.596</b>	

- c. Pada Rumusan Program Kegiatan terdapat ketidakesuaian dengan rancangan awal karena terdapat beberapa penyesuaian berdasarkan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah dilakukan pemetaan numenklatur program dan kegiatan berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja Tahun 2023 terhadap kesesuaian dengan RKPD oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil penggerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1 (Tabel TC-33)**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**

Nama Perangkat Daerah :Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				99.520.388.596				116,297,505,102
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik		100 % 60 % 100 %	38.821.212.096			100 % 60 % 100 %	40.446.387.033
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan naik, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu		7 Dokumen	1.963.655.000			7 Dokumen	971.715.913
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Dokumen	361.646.800	Dana Transfer Khusus- Alokasi Khusus Fisik PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	148,659,557
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Dokumen	14.223.100	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		48 Dokumen	74,866,586

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Dokumen	16.214.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Dokumen	19,577,093
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Dokumen	17.918.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Dokumen	33,551,280
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Dokumen	28.673.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Dokumen	27,501,697
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Dokumen	16.214.300	Dana Transfer Khusus-Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laporan	624,928,423
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Dokumen	17.918.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	42,631,277
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu</b>		<b>Laporan 61</b>	<b>24.758.746.896</b>			<b>61 Laporan</b>	<b>30,925,485,220</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	209 Orang/Bulan	24,608.721.896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		209 Orang/ Bulan	30,677,062,500
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	11,550,000

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	16.407.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	69,109,490
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	3.529.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	55,813,181
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	6.405.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3,510,911
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	35.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	46,850,958
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SK dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SK dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Laporan	87.913.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	55,813,180
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,775,000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>63.810.700</b>			<b>7 Laporan</b>	<b>40,425,000</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.690.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,775,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	54.660.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,775,000

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	6.460.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5,775,000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5,775,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5,775,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5,775,000
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,775,000
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah perangkat daerah</b>		<b>1 Laporan</b>	<b>30.040.000</b>			<b>2 Laporan</b>	<b>22.050.000</b>
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	30.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	11,025,000
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	11,025,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah</b>		<b>100 persen</b>	<b>484.248.200</b>			<b>100 Persen</b>	<b>618,054,453</b>
Peningkatan Sarana dan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	23.780.000	PENDAPATAN ASLI		2 Unit	55,125,000

Prasarana Disiplin Pegawai					DAERAH (PAD)			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	209 Paket	333.610.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		209 Paket	210,775,950
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	5.246.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	46,072,993
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	6.202.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	32,571,312
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	57.090.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	73,116,698
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	181,912,500
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Orang	58.319.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	9,240,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	9,240,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>100 persen</b>	<b>1.907.494.830</b>			<b>100 Persen</b>	<b>2,042,612,009</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Paket	30.647.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	57,881,250
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Paket	826.939.030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Paket	999,035,121

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Paket	93.555.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	11,576,250
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	22,050,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Paket	104.102.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Paket	103,144,388
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	150.735.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	115,762,500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	698.245.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	694,575,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	3.269.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,512,500
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	33,075,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</b>		<b>Unit</b>	<b>153.102.360</b>			<b>12 Unit</b>	<b>787.500.000</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	53.102.360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	52,500,000

Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	105,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	420,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	210,000,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2 Jenis</b>	<b>4,717,482,391</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>4 Jenis</b>	<b>3,636,412,500</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	11,025,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2.459.372.135	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,389,150,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	16,537,500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	3.710.395.644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	2,219,700,000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</b>		<b>30 Unit</b>	<b>3.290.346.331</b>			<b>81 Unit</b>	<b>1,402,131,938</b>

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Unit	1.977.276.531	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Unit	29,519,438
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Unit	133.169.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	57,881,250
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	57,881,250
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	1.129.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Unit	926,100,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	220,500,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	110,250,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Jumlah produksi</b>	<b>100 67,3 48.450</b>	<b>% % Ton</b>	<b>11,969,196,200</b>			<b>100 % 1038850.36 48450 Ton 85.94 Rp. Miliar</b>	<b>12,872,470,171</b>

	<b>garam rakyat</b>							
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	21 55	Ha Unit	11.642.290.100			56.45 Ha 21 Unit	11,311,330,171
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1038850.36 Ha	692.365.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1038850.36 Ha	578,812,500
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.45 Ha	10.028.792.100	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		56.45 Ha	10,732,517,671
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah dokumen teknis pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi	2 12	Dokumen Rekomendasi	1,830,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 Rekomendasi	56,227,500

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendasi	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Rekomendasi	11,025,000
Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Rekomendasi	1,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Rekomendasi	13,230,000
Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendasi	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Rekomendasi	13,230,000
Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendasi	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Rekomendasi	13,230,000
Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	5,512,500
<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Jumlah unit usaha masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan</b>		<b>24 Unit</b>	<b>919.303.000</b>		<b>24 Unit</b>	<b>1,504,912,500</b>

Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	218.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	50	173,643,7
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Kelompok	673.050.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Kelompok	1,157,625,000	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Kelompok	27,643,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Kelompok	173,643,750	

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan							
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah produksi perikanan tangkap Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	30.25 413.030,8 9.210,12 27.17 78,95	% Ton Rp. Milyar % %	36.133.269.400			30.25 % 413030.8 Ton 9210.12 Rp Milyar 78.95 % 27.17 %	31,470,604,390
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	287	Unit	15,523,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		287 Unit	19,007,100,000
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110,250,000
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Kab. Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Barru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Jeneponto, Semua		7.411.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Unit	15,589,350,000

	Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Palopo, Semua KelurahanKab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Penjaminan Ketersediaan SaranaUsaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Bantaeng, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Baru, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bone, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangkajene Kepulauan,	510 unit	4.638.953.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300 unit	3,307,500,000.00
---	--	--	----------	---------------	------------------------------	----------	------------------

	Semua KelurahanKa b. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Pare Pare, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Palopo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan penangkapan ikan		Unit	207.004.500		1 unit

Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	55.125.000
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	551.200.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Enrekang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	207.004.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32 Unit	303.007,500
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		100 Rekomendasi	18.389.800			100 Rekomendasi	55.125.000
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Rekomendasi	11.025.000

Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Rekomendasi	18.389.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	33.075.000
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	11.025.000
<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan di Miliki Oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan</b>		<b>0 rekomendasi</b>	<b>0</b>		<b>20 rekomendasi</b>	<b>60.637.500</b>
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	11.025.000
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendasi	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Rekomendasi	49.612.500

<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Tanda Daftar Kapal yang telah diterbitkan		<b>0 Laporan</b>		0			<b>1 Dokumen</b>	46.856.250
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		125 Dokumen	55.12.500
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Dokumen	41.343.750
<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola</b>	<b>5 Unit</b>	<b>Unit</b>	<b>23.857.232.100</b>				<b>5 Unit</b>	<b>11.332.018.140</b>
Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Lokasi		51.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lokasi	115.104.390
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Pelabuhan Perikanan		23.634.011.500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI		5 Pelabuhan Perikanan	10.395.000.000

					DAERAH (PAD)			
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Layanan	172.220.600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Layanan	821.913.750
<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>Jumlah rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT</b>		<b>0 rekomen dasi</b>	<b>0</b>			<b>20 Rekomendasi</b>	<b>27.562.500</b>
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.512.500
Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendas i	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		20 Rekomendasi	22.050.000

Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan & Kapal Pengangkut dgn Ukuran Sampai dgn di Laut,Sungai,Danau,Waduk dan Genangan air lainnya dapat di usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi		0 Rekomendasi	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Rekomendasi	7.717.500
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.512.500
Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendas i	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Rekomendasi	2.205.000
Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah laporan pendaftaran Kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT		0 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	16.537.500

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.512.500
Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendas i	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Rekomendasi	11.025.000
<b>Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah laporan pendaftar Perikanan Berukuran Sam Dengan 10 GT yang Berop Laut,Sungai,danau,wad uk, Genangan air Lainnya Dap diusahakan Lintasan Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi</b>		<b>0 Laporan</b>	<b>0,000</b>			<b>1 Laporan</b>	<b>7.717.500</b>
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5,512,500
Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendas i	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Rekomendasi	2,205,000

<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Nilai Hilirisasi produksi perikanan budidaya Persentase ketersediaan benur berkualitas	4.298.391,1 15.958,39 100	Ton Rp. Miliar Persen	7.124.746.500			4298391.1 15958.39 Rp Miliar 100 Persen	Ton 16,689,261,750
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dal (satu) daerah Provinsi		0 rekomen dasi	0			1 Rekomendasi	66.150.000
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendas i	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		5 Rekomend	5.512.500
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendas i	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.512.500
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Rekomendasi	55.125.000

Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing		0 rekomen dasi	0			1 Rekomendasi	16.537.500
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendas i	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		100 Rekomendasi	5.512.500
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendas i	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Rekomendasi	11.025.000
Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah rekomendasi Izin kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/Atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan		0 Rekomenda si	0			1 Rekomendasi	7.717.500
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendas i	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Rekomendaso	5.512.500

Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan							
Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendasi	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Rekomendasi	2.205.000
<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah laporan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) DI Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dalam provinsi</b>		<b>0 Laporan</b>	<b>0</b>			<b>1 Rekomendasi</b>	<b>16.537.500</b>
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendasi	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Rekomendasi	5.512.500
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendasi	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Rekomendasi	11.025.000

<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>		<b>133 Unit</b>	<b>7.124.746.500</b>			<b>133 Unit</b>	<b>5.075.083.125</b>
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	55.125.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130 Unit	3.095.477.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130 Unit	3.711.841.875
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	50.006.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	237.313.125
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	47.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Dokumen	162.067.500
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	49.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		540 Orang	908.735.625
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Tawar</b>		<b>150 Unit</b>	<b>4.029.269.500</b>			<b>428 Unit</b>	<b>11.507.236.125</b>

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Unit	3.371,965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Fisik: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41 Unit	1.007.236.125
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bulukumba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gowa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jeneponto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Luwu	150 unit	657.304.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Fisik: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165 unit	10.500.000.000

		Utara, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Maros, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pangajene Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKota Makassar, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundungan yang berlaku</b>	89,85	%	<b>4.306.335.000</b>			<b>12.172.148.689</b>
<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	9	Unit usaha	<b>4.268.230.000</b>			<b>11.939.993.689</b>
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	77.555.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	114.818.689

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	3,363,856,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	11.698.545.000
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	17.830.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	52.762.500
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kelompok	218.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Kelompok	73.867.500
<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diolah Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah sarana prasarana pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya</b>		<b>2 Unit</b>	<b>38.105.000</b>			<b>12 Unit</b>	<b>232.155.000</b>

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	116.077.500
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10.860.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	52.762.500
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	17.185.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	63.315.000
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Nilai produksi ikan konsumsi dan yang dipasarkan Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan Produksi olahan ikan</b>	<b>317.28 100 5.544,1</b>	<b>Rp. Miliar % Ton</b>	<b>1.492.535.500</b>			<b>317.28 Rp. Miliar 20 % 5544.1 Ton</b>	<b>2.646.633.069</b>

	<b>konsumsi dan non konsumsi</b>							
<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan</b>		<b>0 rekomendasi</b>	<b>0</b>			<b>1 Rekomendasi</b>	<b>70.008.750</b>
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Rekomendasi	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Rekomendasi	5.512.500
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		0 Rekomendasi	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	9.371.250
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	55.125.000

Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar yang mendapatkan pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	100	Unit usaha	1.491.784.100			100 Unit usaha	2.510.474.319
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		491.784.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130 Unit Usaha	359.442.300
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.151.032.019
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan	Jumlah laporan Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia dan disalurkan		2 Laporan	751.400			2 Laporan	66.150.000

Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	351.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	55.125.000
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	11.025.000
			<b>TOTAL</b>	<b>99.520.388.596</b>			<b>116.297.505.102</b>

Berdasarkan tabel diatas maka diuraikan sasaran strategis tahun 2023 yang akan didukung yaitu:

**Sasaran :**

1. Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah produksi dan produktivitas produksi
2. Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan

Didukung oleh program :

**Program Prioritas :**

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

**Indikator Program :**

- a. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2023 sebesar Rp. 9.210,12 M
- b. Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2023 sebesar 413.030,8 ton
- c. Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional tahun 2023 sebesar 78,95 %
- d. Cakupan Bina Kelompok Nelayan pada tahun 2023 sebesar 30.25 %
- e. Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2023 sebesar 27.17 %

Program ini meliputi kegiatan :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
  - d. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan perikanan Provinsi
- Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :
- a. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
  - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
  - c. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan aspek kajian pengembangan dan pembangunan perikanan tangkap yang menentukan keberhasilan dan tingkat produktifitas unit usaha. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil berbasis Teknologi penangkapan ikan (fishing technology) yang diarahkan pada peningkatan produktifitas penangkapan sebagai target pencapaian dengan indikator kinerja diarahkan pada efektifitas dan efisiensi upaya penangkapan ikan yang dilakukan meliputi:

- a) Penerapan teknologi penangkapan ikan berbasis potensi ruang dengan menetapkan komoditas unggulan sebagai target tangkapan,
- b) Pemanfaatan teknologi alat bantu penangkapan ikan seperti penggunaan Global Position Service (GPS), cahaya, umpan, dan resonansi suara
- c) Penanganan dan pengendalian teknologi penangkapan ikan yang overfishing dan tidak ramah lingkungan (destructive fishing) melalui pengelolaan jumlah dan jenis alat tangkap, pengaturan ukuran mata jaring untuk selektifitas target tangkapan, dan pembatasan daerah operasi penangkapan ikan pada zona terlarang.
- d) Pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Ikan
- e) Pelayanan rekomendasi usaha Perikanan tangkap dalam rangka perijinan dan kemudahan akses nelayan dalam melakukan usaha Perikanan tangkap di luar wilayah penangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan.
- f) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama yang berbasis antar pemerintah, institusi, lembaga dan swasta dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.

- g) Revitalisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan yang lebih modern untuk menjaga kualitas hasil tangkapan dan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global.

Gambaran umum potensi pembangunan perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga karakteristik wilayah pesisir yang khas/spesifik, yaitu perairan wilayah pesisir Teluk Bone, wilayah pesisir Laut Flores, dan wilayah pesisir Selat Makassar. Ketiga karakteristik wilayah perairan ini seharusnya mampu dioptimalkan pemanfaatannya sebagai potensi yang sangat besar dan luar biasa dalam mengakselerasi pembangunan perikanan tangkap dan mendukung *Marine Culture*.

Kajian ikan target tangkapan (fish target) dan daerah penangkapan ikan (fishing ground) dititikberatkan pada analisis entitas dan potensi ruang yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagai wilayah kajian dengan segala potensi sumberdaya ikan yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup kajian target tangkapan akan mendeskripsikan produksi dan potensi sumberdaya ikan yang berada pada suatu daerah penangkapan ikan melingkupi komposisi jenis, ukuran ikan, jumlah hasil tangkapan sebagai total produksi dan jumlah stok sumberdaya ikan, ekosistem dan habitat keberadaan target tangkapan, dan tingkah laku ikan target tangkapan. Pengetahuan dan pemahaman tingkah laku ikan target tangkapan terhadap penguasaan karakteristik daerah penangkapan merupakan acuan dasar dan basis pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Diperlukan manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, baik yang bersifat teknis pada teknologi penangkapan ikan maupun yang bersifat manajemen dalam pengelolaan base-line data secara sistematis dan terstruktur dari waktu ke waktu untuk memperbaiki dan mengembangkan kondisi eksisting yang telah dicapai. Selain itu memberdayakan armada plasma yang merupakan kapal/perahu nelayan skala kecil untuk mendukung *marine culture*.

Peluang pengembangan perikanan tangkap dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan yang tersebar di 19 kabupaten/kota dengan memfasilitasi pelayanan kepada nelayan baik skala besar maupun skala kecil dengan memperhatikan aspek kualitas mutu dan hygienisasi sarana prasarana pelabuhan perikanan.

## **2. Program Perikanan Budidaya :**

### **Indikator Program :**

- a. Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan Budidaya tahun 2023 Rp. Rp. 15.958,39 M**
- b. Produksi Perikanan Budidaya tahun 2023 sebesar 4.298.391,1 ton**
- c. Persentase ketersediaan benur berkualitas 100% per tahun**

Program ini diarahkan untuk mendukung keberhasilan pengembangan komoditas unggulan yaitu udang windu dan rumput laut serta komoditas ikan lainnya dimana dibutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014. Pemerintah provinsi selaku Pembina antar kabupaten/kota akan efektifkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi. Adapun dukungan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Program ini meliputi kegiatan :

### **1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut**
- b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut**
- c. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
- d. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi**

### **2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Darat**

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
- b. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

Program kegiatan ini adalah kelompok prioritas yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dimana indikatornya fokus pada nilai hilirisasi produk. Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan optimalisasi hilirisasi produk untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu Pengembangan Hilirisasi Komoditas Unggulan yaitu **udang windu** dan **rumput laut** dengan melakukan Diseminasi teknologi dan Inovasi berbasis kawasan dan berkelanjutan sampai tahun 2023. Adapun tujuan program adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya, 3) Pemulihan ekonomi pasca bencana alam dan pandemik global. Adapun produksi komoditas unggulan perikanan budidaya pada tahun awal kondisi tahun 2018 dan 2020 dan rencana tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Selain itu Program tersebut diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri strategis perikanan di Sulawesi Selatan dengan prioritas usaha adalah agroindustri dan industri yang memiliki keterkaitan industri/pasar daerah lain termasuk luar negeri, melalui usaha ini akan memicu laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Selain itu dilakukan pengembangan kampung pembudidaya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, kampung ini diharapkan dapat memulihkan Ekonomi masyarakat dengan Corporate Farming dengan membangun Kampung-Kampung Perikanan Budidaya Tawar, Payau Dan Laut seperti *Kampung Lobster, Lele, Nila, Kakap, Kerapu, Rumput Laut, dll.*

Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpu pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang, Bandeng dan komoditas ikan lainnya. Dalam rangka pencapaian target kinerja maka implementasi program, kegiatan dan subkegiatan lebih diarahkan pada:

- a. Pengembangan budidaya rumput laut dengan melakukan pengembangan dari hulu yaitu pengembangan bibit hasil kultur jaringan dan hilir yaitu penanganan pasca panen di 19 kabupaten/kota serta percontohan budidaya laut (*marine culture*) yang ramah lingkungan di kabupaten/kota yang sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan untuk produksi benur yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan benur pada program prioritas dan permintaan masyarakat dalam mengembangkan usaha budidaya payau.
- c. Pengembangan budidaya air tawar sesuai kewenangan provinsi dan pemeliharaan sarpras instalasi Balai Benih Ikan Provinsi dalam rangka peningkatan produksi benih

komoditas ikan air tawar dan memenuhi kebutuhan benih dalam rangka pemulihan ekonomi.

- d. Revitalisasi sarana dan prasarana perikanan budidaya payau dan air tawar dalam rangka peningkatan produksi, pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana alam dan pandemik global dan ketersediaan pangan ikan dari perikanan budidaya untuk penanganan stunting.
- e. Pengendalian dan pengelolaan Kesehatan lingkungan budidaya payau, tawar dan laut.
- f. Koordinasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas daerah.
- g. Penyediaan prasarana produksi budidaya air tawar dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan keluarga untuk mendukung penurunan angka stunting di Sulawesi Selatan.

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan, perluasan jejaring, kerjasama antar pemerintah, institusi, lembaga, swasta dan kemitraan serta mengoptimalkan hilirisasi produk yang dapat memberikan dampak perekonomian daerah.

### **3. Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

#### **Indikator Program**

- a. **Produksi garam rakyat tahun 2023 sebesar 48.450 ton**
- b. **Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan tahun 2023 sebesar 100%**

Dalam rangka pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diupayakan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya **pesisir dan pulau-pulau kecil** yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program ini diarahkan pada pengembangan pengembangan dan pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu program yang mendukung penanganan kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan kecil merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Salah satu strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yaitu

meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Adapun dukungan kegiatannya adalah sebagai berikut.

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- c. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- d. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pada program, kegiatan dan sub kegiatan ini diarahkan pada pengembangan usaha garam juga menjadi prioritas pada program hilirisasi perikanan dimana input produksi memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi pengembangan berada pada 5 kabupaten yaitu kabupaten Jeneponto, kabupaten Takalar, kabupaten Pangkep , Kabupaten Maros dan kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun optimalisasi pengembangan dengan menyediakan fasilitas prasarana seperti gudang garam mini, penerapan teknologi produksi dan penanganan pasca panen. Dalam rangka mendukung industrialisasi garam dilakukan kerjasama lintas sektor dimana peran yang akan dilakukan yaitu dapat menjamin ketersediaan stok/bahan baku garam untuk industrialisasi dan melakukan inovasi produk garam menjadi produk yang lebih berdaya saing.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Indikator Program :

a. Nilai Hilirisasi Produk olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2023 sebesar

Rp. 317.28 Miliar

b. Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi tahun 2023 sebesar 5.544,1 ton

c. Persentase pembinaan mutu produk perikanan tahun 2023 sebesar 100%

Tahun 2023 akan dilakukan upaya untuk mendukung hilirisasi produk perikanan dan melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya. Dalam rangka peningkatan konsumsi ikan pada

masyarakat dan menghasilkan produk yang berdaya saing untuk menghadapi masa pandemik dan menumbuhkan kembali usaha unit pengolah yang tahun 2020 mengalami masa sulit dalam berusaha akibat pandemik global maka optimalisasi pengembangan yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan fasilitasi bimbingan, pembinaan dan revitalisasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran dalam mendukung bahan baku industri serta melakukan inovasi olahan produk perikanan. Adapun dukungan kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- b. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing

2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran diarahkan pada program hilirisasi perikanan dengan melakukan inovasi produk pengolahan agar produk perikanan memiliki nilai tambah produk sehingga memberikan dampak hasil yang cukup menjanjikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu program ini mendukung pencapaian indikator SDGs untuk penurunan stunting dan pemulihan ekonomi. Selain itu dalam rangka mendukung industrialisasi, akan dilakukan pemetaan dan pemantauan bahan baku usaha pengolahan, pengujian sampel mutu produk, dan pengembangan informasi manajemen logistik ikan secara digitalisasi.

**Sasaran : Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan**

Didukung oleh program :

**Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

**Indikator Program :**

- a. Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan tahun 2023 sebesar 67,31%
- b. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2023 sebesar 100 %

Program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya agar dapat menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Usaha tersebut sebagai perwujudan bagi Sulawesi Selatan sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang berkeadilan. Tujuan yang dapat dicapai adalah untuk meningkatkan daya tarik wilayah terhadap investor termasuk kunjungan wisata dan sekaligus juga dapat memberi iklim yang kondusif bagi Sulawesi Selatan dalam pengembangan kegiatan konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta mendukung penurunan/emisi karbon.

Pada program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

2. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
- b. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Adapun upaya yang dilakukan pada sub kegiatan adalah

- a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan inovasi pemanfaatan dan pengelolaan.
- e. Penyusunan kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang
- f. Pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan
- g. Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses
- h. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- i. Pengembangan Wisata Bahari dan pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem pesisir dengan integrasi pengembangan lintas sektor serta edukasi kepada masyarakat.
- j. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mendukung kelestarian kawasan konservasi dan melakukan pembinaan kelompok.

**Indikator Program :**

**Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tahun 2023 sebesar 89,85%**

Pada program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan membentuk sistem pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan khususnya untuk pengawasan destructive fishing, illegal fishing, pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan, penataan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perikanan. Program ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan organisasi masyarakat lokal sebagai upaya strategis dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Program ini memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
- c. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
- d. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
- b. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya

- c. Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Usaha yang dapat dilakukan dalam mendukung kegiatan yaitu :

1. Patroli dalam rangka pengawasan baik di laut, perairan umum dan darat serta koordinasi dan pengawasan terpadu bersama aparat terkait dalam rangka melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran dan penanganan kasus.
2. Kerjasama antar pemerintah pusat, kabupaten/kota maupun provinsi lain dalam rangka pengawasan wilayah laut dan perairan umum.
3. Sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terhadap larangan penggunaan bahan dan alat tangkap yang dapat merusak sumberdaya perikanan.
4. Intensifikasi pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan bahan terlarang untuk penanganan hasil perikanan
5. Pelatihan kesadaran masyarakat dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan sumberdaya perikanan yang dilaksanakan dengan melibatkan kaum muda yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok masyarakat Pengawas Perikanan disetiap daerah dan melakukan pembinaan
7. Himbauan dan larangan terhadap pengambilan terumbu karang dan biota - biota tertentu yang dianggap telah hampir punah.
8. Melalui usaha tersebut diatas, maka diharapkan tingkat kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan berkurang dan terjadi peningkatan produktivitas tangkapan ikan.

Untuk kelancaran dan dukungan operasional kegiatan maka terdapat Program Penunjang untuk mendukung Program Utama yaitu :

### **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Indikator Program :

- a. Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah
- b. Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan Sangat baik
- c. Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP

Pada program ini akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

**1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

**3. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

**4. *Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- d. Pengolahan Data Retribusi Daerah
- e. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- f. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

#### **5. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatan :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- g. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- h. Pemindahan Tugas ASN
- i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

#### **6. *Administrasi Umum Perangkat Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

#### **7. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Pengadaan Mebel

- b. Pengadaan Aset Tak Berwujud

**8. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

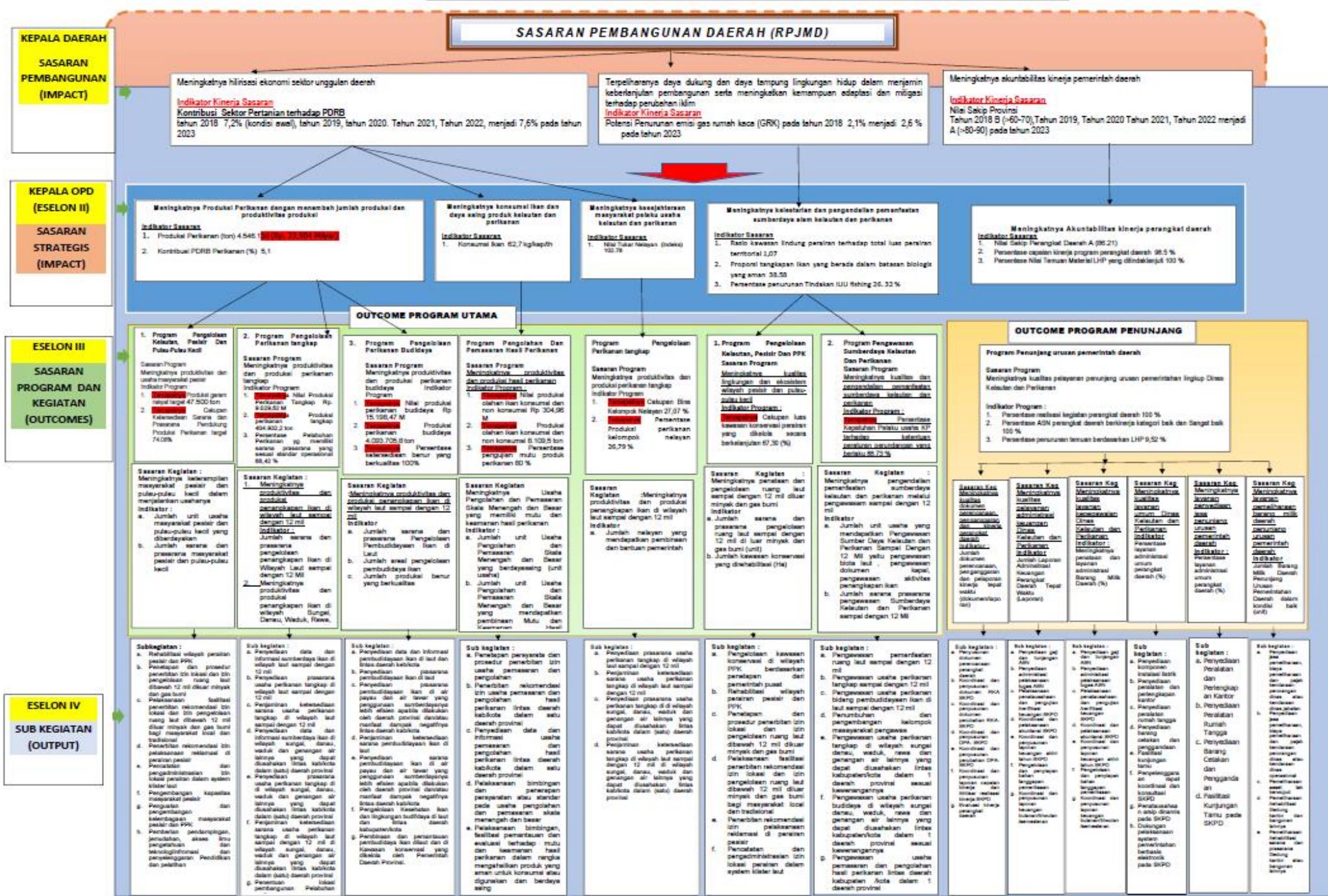
**9. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

Adapun sub kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berikut pohon Kinerja/Cascading untuk tahun 2023 seperti pada gambar dibawah ini :

POHON KINERJA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **1.1. Catatan Penting**

Berdasarkan hasil Musrenbang Provinsi terdapat beberapa usulan bantuan hibah masyarakat yang diakomodir dan diharapkan kabupaten/kota dan aspirasi pokok-pokok pikiran dapat memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan hibah yang berlaku. Selain itu kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat karena pada tahun 2023 diarahkan pada program prioritas pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi pada masyarakat pesisir pasca pandemik COVID-19, dan perbaikan/ restorasi kawasan mangrove dalam rangka penataan dan perbaikan lingkungan pesisir Dalam pelaksanaannya ke depan maka perlu kesiapan dan dukungan anggaran serta secara teknis agar kabupaten/kota dapat membantu masyarakatnya untuk memenuhi persyaratan proposal dan integritas dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut. Namun seandainya anggaran yang ada tidak tersedia maka alternative yang ditempuh adalah dengan memilih kegiatan yang lebih prioritas sesuai kebijakan pemerintah daerah.

#### **1.2. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2023. Renja ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2023. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk optimalisasi dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dicapai. Perencanaan tidak berhenti pada penyusunan dan

penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan Rencana dan Tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membuktikan (*Proving*) kinerja dan untuk memperbaiki (*Improving*) kinerja. Adapun kendala yang masih dihadapi adalah :

**a. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan**

Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha;

**b. Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien**

Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi;

**c. Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif**

Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai belum berjalan sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (*talent pool*) untuk kaderisasi kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier pegawai yang memiliki prestasi baik. Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi pemerintah. Perbaikan gaji (remunerasi) masih terkendala dengan sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan APBN.

#### **d. Inefisiensi penggunaan anggaran**

Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:

- 1) belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan 2) besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan;

#### **e. Optimalisasi Pelayanan publik yang berkualitas**

Menyadari bahwa kemampuan Sumberdaya Masyarakat yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbatas, maka guna mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan perikanan di Sulawesi Selatan sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta perikanan, dan masyarakat pelaku usaha perikanan. Dukungan tersebut, baik berupa saran dan koreksi untuk menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023.

Perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun diluar pemerintahan.

### **1.3. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2022 diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemulihan perekonomian nasional dan daerah serta pemeliharaan kesejahteraan masyarakat mendukung sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Dokumen Rencana Kerja OPD ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 oleh masing-masing unit kerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan Sulawesi Selatan ke depan.

Kerjasama yang diharapkan dapat memantapkan posisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam membangun perikanan di Sulawesi Selatan dan Nasional, dalam hal Penghasil devisa, Penyerapan tenaga kerja dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.